



Dr. Sudirman, SE., ME.I

— PARADIGMA
**PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**

Pengantar:
Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, SE., MA

Editor:
Hj. Susilawati, SE., M.Si

MAGNUM

BAB I

PARADIGMA PEMBANGUNAN

A. PARADIGMA UMUM

Pembangunan manusia tidak saja bermaksud membina hubungan dan kehidupan setiap orang untuk hidup bermasyarakat, melainkan juga untuk membangun masyarakat karena setiap satuan masyarakat memiliki *community power*. Menurut Nelson W. Polsby dalam *The International Encyclopedia of the Social Sciences* (1972) sebagaimana dikutip Ndraha (1987:40) bahwa suatu masyarakat bisa kehilangan kekuatannya jika masyarakat itu mengalami *community disorganization*, karena itu untuk mengatasinya, maka *community development* atau pembangunan masyarakat dilancarkan.

Pengertian perubahan sosial yang direncanakan dan diarahkan adalah suatu usaha yang direncanakan untuk memodifikasi sikap dan tingkah laku individu atau kelompok yang dijadikan sasaran perubahan, yang dilakukan oleh agen perubahan dengan cara memperkenalkan ide-ide baru atau mengadakan inovasi ke dalam sistem sosial untuk mencapai tujuan seperti yang direncanakan oleh para agen tersebut atau organisasinya (pemerintah, LSM, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat). Birokrasi merupakan agen perubahan sosial. Birokrasi meliputi birokrasi publik (yang beraktivitas dalam struktur pemerintahan) dan birokrasi privat (yang beraktivitas dalam kehidupan organisasi swasta).

Pelaksanaan pembangunan pada negara-negara yang sedang berkembang dengan strategi ekonomi, ternyata tidak menjamin distribusi pendapatan nasional dan harapan “*trickle down effect*”, bahkan tidak menguntungkan sekelompok masyarakat miskin (Supriatna, 2003:15). Strategi pembangunan dengan pertumbuhan

ekonomi sering mengabaikan masalah pemerataan, karena hasil pembangunan terkonsentrasi pada sekelompok komunitas, sehingga masalah pembangunan pada negara berkembang semakin kompleks yang ditandai dengan pengangguran, urbanisasi, marginalisasi kemiskinan.

Pada akhir dasa warsa 1950-an istilah ‘pembangunan’ sering dianggap sebagai ‘obat’ terhadap berbagai macam masalah yang muncul dalam masyarakat. Era awal dari pembahasan mengenai teori pembangunan adalah dikemukakannya ‘Teori Pertumbuhan’. Menurut Clark (1991:20) “pemikiran mengenai teori pertumbuhan berasal dari pandangan kaum ekonom ortodoks yang melihat ‘pembangunan’ sebagai pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diasumsikan akan meningkatkan standar kehidupan”.

Sekitar tahun 1980-an, strategi pembangunan mulai bergeser menjadi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan (*growth and equity of strategy development*). Strategi ini pun masih mengalami masalah lainnya, yaitu adanya ketergantungan negara berkembang kepada negara maju berupa investasi, bantuan luar negeri dan pinjaman. Kemudian sejak memasuki abad ke-21 muncul strategi baru, yaitu diterapkannya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didukung dengan konsep pembangunan manusia (*human development*).

Mengutip Denis Gault, Suwandi (1997:5) menjelaskan bahwa dalam usaha menuju kehidupan yang baik, sedikitnya ada tiga pokok (*core values*) sebagai konsep pokok dalam memahami pembangunan yaitu: kemandirian hidup (*life sustenance*), harga diri (*self esteem*), kemerdekaan (*freedom*). Melihat konsepsi yang diberikan oleh Suwandi tersebut, jelas bahwa proses pembangunan dititik beratkan pada bagaimana individu-individu yang menjadi objek pembangunan harus mampu mengembangkan sikap mental kemandirian, guna mendukung proses pembangunan yang dijalankan.

Sehubungan dengan kegiatan pembangunan tersebut, maka pembangunan itu sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Siagian (1992:1): Suatu usaha atau rangkaian dari perubahan yang berencana yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa
2. Tjokroamidjojo (1992:13): Proses pengendalian usaha (administrasi) negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik demi kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.
3. Supriatna (2003:29): Sebagai sistem mencakup komponen
 - a) masukan terdiri dari nilai, sumber daya manusia dan alam, budaya, kelembagaan masyarakat; b) proses, kemampuan organisasi dan manajemen pemerintahan dalam melaksanakan program pembangunan; c) keluaran, berupa perubahan kualitas perilaku manusia yang berakses pada kognisi, afeksi dan keterampilan yang berkaitan dengan taraf hidupnya.

Dari beberapa pengertian atau definisi tentang pembangunan itu, dapat disimpulkan bahwa pembangunan mengandung pengertian:

1. Pembangunan sebagai suatu perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Pembangunan sebagai suatu proses usaha/kegiatan perubahan yang secara sadar dilakukan, artinya pembangunan didasarkan pada suatu rencana yang disusun secara baik untuk satu kurun waktu tertentu.
3. Pembangunan sebagai pertumbuhan yaitu kemampuan suatu bangsa untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
4. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

rangka mencapai status modern, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern. Modernisasi merupakan proses sistematis. Modernisasi melibatkan perubahan pada hampir segala aspek tingkah laku sosial, termasuk di dalamnya industrialisasi, diferensiasi, sekularisasi, sentralisasi dsb. Ciri-ciri pokok teori modernisasi:

1. Modernisasi merupakan proses bertahap.
2. Modernisasi juga dapat dikatakan sebagai proses homogenisasi.
3. Modernisasi terkadang mewujud dalam bentuk lahirnya, sebagai proses Eropenisasi dan Amerikanisasi, atau modernisasi sama dengan Barat.
4. Modernisasi juga dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur.
5. Modernisasi merupakan perubahan progresif
6. Modernisasi memerlukan waktu panjang. Modernisasi dilihat sebagai proses evolusioner, dan bukan perubahan revolusioner.

Tokoh-tokoh teori modernisasi:

1. Harrod-Domar

Bependapat bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal. Prinsip dasar : kekurangan modal, tabungan dan investasi menjadi masalah utama pembangunan.

2. Walt .W. Rostow

Teori Pertumbuhan Tahapan Linear (*linear-stages-of growth-models*) proses pembangunan bergerak dalam sebuah garis lurus yakni masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Masyarakat Tradisional è masyarakat pertanian. Ilmu pengetahuan masih belum banyak dikuasai.

- b. Prakondisi untuk Lepas Landas è masyarakat tradisional terus bergerak walaupun sangat lambat dan pada suatu titik akan mencapai posisi pra-kondisi untuk lepas landas.. contoh adanya campur tangan u/ meningkatkan tabungan masyarakat terjadi, dimana tabungan tsb dimanfaatkan u/ sektor2 produktif yang menguntungkan. Misal Pendidikan
- c. Lepas Landas è ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Tabungan dan investasi yang efektif meningkat dari 5%-10 %.
- d. Bergerak ke Kedewasaan è teknologi diadopsi secara meluas.
- e. Jaman Konsumsi Masal yang Tinggi è Pada tahap ini pembangunan sudah berkesinambungan

3. David McClelland

Teori: need for Achievement (n-Ach). kebutuhan atau dorongan berprestasi, dimana mendorong proses pembangunan berarti membentuk manusia wiraswasta dengan n.ach yang tinggi. Cara pembentukanya melalui pendidikan individu ketika seseorang masih kanak-kanak di lingkungan keluarga.

4. Max Weber

Hasil analisis: salah satu penyebab utamanya adalah “Etika Protestan”. Etika Protestan:

- a. Lahir melalui agama Protestan yg dikembangkan oleh Calvin
- b. Keberhasilan kerja di dunia akan menentukan seseorang masuk surga/neraka.
- c. Berdasarkan kepercayaan tsb kemudian mereka bekerja keras u/ menghilangkan kecemasan. Sikap inilah yg diberi nama “etika protestan”.

5. Bert F. Hoselitz

Membahas faktor-faktor non ekonomi yg ditinggalkan Rostow yang disebut faktor “kondisi lingkungan”. Kondisi lingkungan maksudnya adalah perubahan-perubahan pengaturan kelembagaan yg terjadi dalam bidang hukum, pendidikan, keluarga, dan motivasi.

6. Alex Inkeles & David H. Smith

Ciri-ciri manusia modern:

- a. Keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru.
- b. Berorientasi ke masa sekarang dan masa depan.
- c. Punya kesanggupan merencanakan.
- d. Percaya bahwa manusia bisa menguasai alam

Bila dalam teori Modernisasi Klasik, tradisi dianggap sebagai penghalang pembangunan, dalam teori Modernisasi Baru, tradisi dipandang sebagai faktor positif pembangunan. Teori Modernisasi, klasik maupun baru, melihat permasalahan pembangunan lebih banyak dari sudut kepentingan Amerika Serikat dan negara maju lainnya.

C. TEORI DEPENDENSI

Teori Dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara Dunia Ketiga. Munculnya teori dependensi lebih merupakan kritik terhadap arus pemikiran utama persoalan pembangunan yang didominasi oleh teori modernisasi. Teori ini mencermati hubungan dan keterkaitan negara Dunia Ketiga dengan negara sentral di Barat sebagai hubungan yang tak berimbang dan karenanya hanya menghasilkan akibat yang akan merugikan Dunia Ketiga. Negara sentral di Barat selalu dan akan menindas negara Dunia Ketiga dengan selalu berusaha menjaga aliran surplus ekonomi dari negara pinggir ke negara sentral.

Teori ini berpangkal pada filsafat materialisme yang dikembangkan Karl Marx. Salah satu kelompok teori yang

D. TEORI SISTEM DUNIA

Teori sistem dunia yang dikemukakan oleh **Immanuel Wallerstein**. Hal ini dikarenakan bahwa dalam suatu sistem sosial perlu dilihat bagian-bagian secara menyeluruh dan keberadaan negara-negara dalam dunia internasional tidak boleh dikaji secara tersendiri karena ia bukan satu sistem yang tertutup. Teori ini berkeyakinan bahwa tak ada negara yang dapat melepaskan diri dari ekonomi kapitalis yang mendunia. Wallerstein menyatakan sistem dunia modern adalah sistem ekonomi kapitalis.

Menurut Wallerstein, sistem dunia kapitalis dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu

1. negara *core* atau pusat, è mengambil keuntungan yang paling banyak, karena kelompok ini dapat memanipulasikan sistem dunia sampai batas-batas tertentu
2. semi-periferi atau setengah pinggiran è mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran yang merupakan pihak yang paling dieksploitir
3. negara periferi atau pinggiran.

Menurut Wallerstein negara-negara dapat “naik atau turun kelas,” misalnya dari negara pusat menjadi negara setengah pinggiran dan kemudian menjadi negara pinggiran, dan sebaliknya. Naik dan turun kelasnya negara ini ditentukan oleh dinamika sistem dunia. Pernah suatu saat Inggris, Belanda, dan Perancis adalah negara pusat yang berperan dominan dalam sistem dunia, namun kemudian Amerika Serikat muncul menjadi negara terkuat (pusat) seiring hancurnya negara-negara Eropa dalam Perang Dunia II.

Wallerstein merumuskan tiga strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas, yaitu:

1. Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang. Sebagai misal negara pinggiran tidak lagi dapat mengimpor barang-barang industri oleh karena mahal

sedangkan komoditi primer mereka murah sekali, maka negara pinggiran mengambil tindakan yang berani untuk melakukan industrialisasi substitusi impor. Dengan ini ada kemungkinan negara dapat naik kelas dari negara pinggiran menjadi negara setengah pinggiran.

2. Kenaikan kelas terjadi melalui undangan. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi ke luar dan kemudian lahir apa yang disebut dengan MNC. Akibat dari perkembangan ini, maka muncullah industri-industri di negara-negara pinggiran yang diundang oleh oleh perusahaan-perusahaan MNC untuk bekerjasama. Melalui proses ini maka posisi negara pinggiran dapat meningkat menjadi setengah pinggiran.
3. Kenaikan kelas terjadi karena negara menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya. Sebagai misal saat ini dilakukan oleh Peru dan Chile yang dengan berani melepaskan dirinya dari eksploitasi negara-negara yang lebih maju dengan cara menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Namun demikian, semuanya ini tergantung pada kondisi sistem dunia yang ada, apakah pada saat negara tersebut mencoba memandirikan dirinya, peluang dari sistem dunia memang ada. Jika tidak, mungkin dapat saja gagal.

Tabel 1

Perbandingan antara Teori Dependensi dan Teori Sistem Dunia

Elemen Perbandingan	Teori Dependensi	Teori Sistem Dunia
Unit Analisis	Negara-Bangsa	Sistem dunia
Metode Kajian	Historis struktural	Dinamika sejarah dunia
Struktur Teori	Dua kutub (sentral-pinggiran)	Tiga kutub (sentral-semi pinggiran-pinggiran)
Arah Pembangunan	Deterministik	Peluang terjadinya mobilitas
Arena Kajian	Negara pinggiran	Negara pinggiran, negara semi pinggiran dan sistem ekonomi dunia

5. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Pembangunan Berkelanjutan di tahun 2002 disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah kondisi dimana masyarakat dapat menentukan dirinya sendiri yang disiapkan dalam perdagangan bebas multilateral dengan syarat terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good government*).
6. Menurut Sudharta P. Hadi dalam bukunya yang berjudul "Opcit" tahun 2007 menyebutkan pengertian pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan.

Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan berarti merupakan pembangunan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup (*well being*) masyarakat dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan masa depan. Dengan demikian, dalam upaya untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan diperlukan adanya paradigma baru dalam perencanaan pembangunan kota dan wilayah yang berorientasi *market driven* (ekonomi), dimensi sosial, lingkungan dan budaya sebagai prinsip keadilan saat ini dan masa depan.

Konsep berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan pun sangat multi-dimensi dan multi-interpretasi. Karena adanya multi-dimensi dan multi-interpretasi ini, para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh Komisi Brundtland yang menyatakan bahwa “pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka” (Fauzi, 2004).

Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan bagaimana mengkonservasi stok kapital. Barbier (1993) merinci tiga

jenis kapital, yaitu: *man made capital (Km)*, *human capital (Kh)*, dan *natural capital (Kn)*. Menurut Permana *et al.*, (1996) dalam Fauzi (2004), setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan.

Pertama, menyangkut **alasan moral**. Generasi kini yang menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumberdaya alam dan lingkungan memiliki kewajiban moral untuk menyisakan layanan sumberdaya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumberdaya alam yang merusak lingkungan sehingga menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama.

Kedua, menyangkut **alasan ekologi**. Keanekaragaman hayati, misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi sehingga aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada hal yang mengancam fungsi ekologi tersebut.

Ketiga, menyangkut **alasan ekonomi**. Alasan dari sisi ekonomi memang masih menjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria berkelanjutan. Dimensi ekonomi keberlanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergenerational welfare maximization*)

Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi, yaitu dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa mendatang, dan dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumberdaya alam dan lingkungan (Heal, 1998 dalam Fauzi, 2004).

Pezzey (1992) melihat aspek keberlanjutan dari sisi yang berbeda. Dia melihat bahwa keberlanjutan memiliki pengertian **statik** dan **dinamik**. Keberlanjutan statik diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara keberlanjutan dinamik diartikan sebagai

C. STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial.

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti ; meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya.

2. Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman.

Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.

3. Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif.

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam

implisit menjadi perhatian dalam konsep brunland tersebut. *Pertama*, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. *Kedua*, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (well-being) generasi mendatang. Hall (1998) menyatakan bahwa asumsi keberlanjutan paling tidak terletak pada tiga aksioma dasar, (1) Perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang; (2) Menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap economic wellbeing; (3) Mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan. Konsep ini dirasakan masih sangat normatif sehingga aspek operasional dari konsep keberlanjutan ini pun banyak mengalami kendala. Perman et al., (1997) mencoba mengelaborasi lebih lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan lima alternatif pengertian: (1). Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (non-declining consumption), (2) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang, (3) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam (natural capital stock) tidak berkurang sepanjang waktu (nondeclining), (4) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan (5) keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (resilience) ekosistem terpenuhi. Senada dengan pemahaman diatas, Daly (1990) menambahkan beberapa aspek mengenai definisi operasional pembangunan berkelanjutan, antara lain: (Untuk sumber daya alam yang terbarukan : laju pemanenan harus sama dengan laju regenerasi (produksi lestari) (Untuk masalah lingkungan : laju pembuangan limbah harus setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan. (Sumber energi yang tidak terbarukan harus dieksplotasi secara quasisustainable, yakni mengurangi laju deplesi dengan cara menciptakan energi substitusi. Selain definisi operasional diatas, Haris (2000) melihat bahwa konsep keberlanjutan

dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, (1) keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. (2) Keberlanjutan lingkungan: Sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. (3). Keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Agenda 21, yang dideklarasikan pada Konferensi PBB tahun 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan, atau KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil; merupakan cetak biru untuk keberlanjutan pada abad ke-21. Agenda 21 disepakati oleh banyak Negara dan pemerintah di dunia yang dipantau oleh Komisi Internasional tentang Pembangunan Berkelanjutan. Agenda ini membahas pembangunan masyarakat dan ekonominya dengan berfokus pada konservasi dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam (Earth Summit Agenda 21 , Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan).

Prinsip-prinsip yang digariskan dalam Deklarasi RIO tentang Lingkungan dan Pembangunan dapat di ikhtisarkan sebagai berikut:

Prinsip 1.

Manusia menjadi pusat perhatian dalam pembangunan berkelanjutan. Manusia berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif, selaras dan harmoni dengan alam.

Prinsip 2 .

Negara memiliki , sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional , hak berdaulat untuk memanfaatkan

jawab yang bersifat “Common but differentiated”. Negara-negara maju mengakui tanggung-jawab nya dalam upaya internasional untuk pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan tekanan masyarakatnya terhadap lingkungan global, serta teknologi dan sumberdaya keuangan yang mereka kuasai.

Prinsip 8 .

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang lebih tinggi bagi seluruh rakyatnya, negara harus mengurangi dan menghilangkan pola-pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan dan mempromosikan kebijakan demografis yang lebih sesuai.

Prinsip 9 .

Negara-negara harus bekerjasama untuk memperkuat pembangunan kapasitas endogen untuk pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan pemahaman ilmiah melalui pertukaran pengetahuan ilmiah dan teknologi; peningkatan pengembangan , adaptasi , difusi dan transfer teknologi , termasuk teknologi baru dan inovatif .

Prinsip 10 .

Isu-isu lingkungan paling bagus ditangani dengan partisipasi seluruh warga masyarakat, sesuai dengan tingkatannya. Di tingkat nasional , setiap individu harus memiliki akses yang tepat terhadap informasi tentang lingkungan yang diselenggarakan oleh otoritas publik, termasuk informasi mengenai bahan-bahan dan aktivitas yang berbahaya dalam komunitasnya , dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan . Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran masyarakat dan partisipasinya dengan menyediakan informasi seluas-luasnya. Akses yang efektif terhadap proses peradilan dan administratif , termasuk ganti rugi dan remediasi, harus disediakan sebaik-baiknya.

Prinsip 11 .

Negara-negara harus memberlakukan undang-undang lingkungan yang efektif . Standar lingkungan , tujuan pengelolaan

dan prioritasnya harus mencerminkan konteks lingkungan dan pembangunan yang mereka terapkan. Standar yang diterapkan oleh suatu negara mungkin tidak sesuai bagi negara lain, dan menimbulkan biaya ekonomi dan biaya sosial bagi negara-negara lain, khususnya di negara berkembang.

Prinsip 12 .

Negara-negara harus bekerjasama untuk mempromosikan sistem ekonomi internasional yang mendukung dan terbuka yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di semua negara; untuk lebih baik mengatasi masalah kerusakan lingkungan. Langkah-langkah kebijakan perdagangan untuk tujuan lingkungan tidak harus merupakan sarana diskriminasi sewenang-wenang atau pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional. Tindakan sepihak untuk menghadapi tantangan lingkungan di luar yurisdiksi negara pengimpor harus dihindari. Langkah-langkah untuk menangani masalah lingkungan lintas batas atau global sejauh mungkin harus didasarkan pada konsensus internasional.

Prinsip 13 .

Negara-negara harus mengembangkan hukum nasional tentang kewajiban dan kompensasi bagi para korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya . Negara-negara juga harus bekerjasama secara cepat dan lebih terukur untuk mengembangkan hukum internasional tentang kewajiban dan kompensasi akibat dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan di dalam kawasan yurisdiksi suatu Negara terhadap kawasan di luar yurisdiksinya.

Prinsip 14.

Negara-negara harus bekerjasama secara efektif untuk menghapus atau mencegah relokasi dan transfer ke Negara lain sesuatu kegiatan dan substansi (materi, zat) yang menyebabkan degradasi lingkungan yang parah atau berbahaya bagi kesehatan manusia.

berkonsultasi dengan Negara-negara lain tersebut pada tahap awal dan dengan itikad yang baik .

Prinsip 20.

Perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan . Partisipasi penuh mereka sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Prinsip 21.

Kreativitas , cita-cita dan keberanian para pemuda dunia harus dimobilisasi untuk menempa kemitraan global guna mencapai pembangunan berkelanjutan dan menjamin masa depan yang lebih baik bagi semua.

Prinsip 22.

Masyarakat adat dan komunitasnya, serta masyarakat lokal lainnya memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan karena mereka mempunyai pengetahuan dan praktek-praktek tradisional (kearifan lokal). Negara harus mengakui dan sepatutnya mendukung identitas, budaya dan kepentingannya dan memungkinkan partisipasi efektif mereka dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Prinsip 23 .

Lingkungan dan sumberdaya alam orang (masyarakat) yang mengalami penindasan , dominasi dan pendudukan harus dilindungi.

Prinsip 24.

Perang mengakibatkan kehancuran pada pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Negara harus menghormati hukum internasional, memberikan perlindungan bagi lingkungan di masa konflik bersenjata dan bekerja sama dalam pengembangan lebih lanjut , jika diperlukan.

Prinsip 25 .

Perdamaian, pembangunan dan perlindungan lingkungan saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan.

Prinsip 26

Negara harus menyelesaikan semua sengketa lingkungan secara damai dan dengan cara yang tepat sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Prinsip 27

Negara dan rakyat harus bekerja sama dengan itikad baik dan dalam semangat kemitraan dalam pemenuhan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi ini dan dalam pengembangan lebih lanjut dari hukum internasional di bidang pembangunan berkelanjutan.

E. PENDEKATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pendekatan pencapaian terhadap keberlanjutan ataupun kesinambungan berbagai aspek kehidupan yang mencakup; keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta keberlanjutan pertahanan dan keamanan

1. Keberlanjutan Ekologis

Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan di bumi tetap terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara dan seluruh kehidupan berkelanjutan.
- b. Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan yaitu ; daya dukung, daya asimilatif dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya terpulihkan. ketiga untuk melaksanakan kegiatan yang

berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal tersebut diatas dapat dicapai melalui kebijaksanaan makro ekonomi mencakup reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi sektor publik, mobilisasi tabungan domestik, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar yang tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset.

3. Keberlanjutan Ekonomi Sektoral

Penyesuaian kebijakan yang meningkatkan keberlanjutan ekonomi makro secara jangka pendek akan mengakibatkan distorsi sektoral yang selanjutnya mengabaikan keberlanjutan ekologis. Hal ini harus diperbaiki melalui kebijaksanaan sektoral yang spesifik dan terarah. Oleh karena itu penting mengindahkan keberlanjutan aktivitas dan ekonomi sektoral.

Untuk mencapai keberlanjutan ekonomi sektoral, berbagai kasus dilakukan terhadap kegiatan ekonomi. Pertama, sumberdaya alam yang nilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai kapital yang tangibble dalam kerangka akunting ekonomi, kedua, secara prinsip harga sumberdaya alam harus merefleksi biaya ekstaksi, ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatannya.

Pakar ekonomi harus mengidentifikasi dan memperlakukan sumber daya sebagai sumber yang terpulih, tidak terpulihkan, dan lingkungan hidup. Sumber yang terpulihkan seperti hutan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bila tidak memperlakukan produktivitas ekonomi sebagai fungsi yang pasif atau jasa yang mengalir; menggunakan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan, sedangkan sumber yang tidak terpulihkan mempunyai jumlah absolut dan berkurang bila dimanfaatkan. Oleh karena itu pada kondisi seperti ini konsep sustainable yeild tidak boleh diterapkan.

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks sumberdaya yang tidak dapat dipulihkan berarti: pemanfaatan secara efisien sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi masa mendatang dan diupayakan agar dapat dikembangkan substitusi dengan sumberdaya terpulihkan; membatasi dampak lingkungan pemanfaatannya sekecil mungkin, karena sumberdaya lingkungan adalah biosfer, secara menyeluruh sumberdaya ini tidak menciut akan tetapi bervariasi sesuai dengan kualitasnya Keberlanjutan Sosial Budaya

Secara menyeluruh keberlanjutan sosial dan budaya dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia.

Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu:

- a. Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.
- b. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. Halangan terhadap keberlanjutan sosial harus dihilangkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan dimungkinkannya untuk mendapat akses pendidikan yang merata, pemerataan pemulihan lahan dan peningkatan peran wanita.
- c. Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi.

BAB III

INDIKATOR

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. SEJARAH

Pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara secara bijaksana. Sumber daya tersebut sifatnya terbatas, sehingga dalam penggunaannya harus secara cermat dan hati-hati. Ketidaktercermatan dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki negara dapat menimbulkan masalah-masalah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya peningkatan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan.

Dalam prosesnya, pembangunan berkelanjutan ini mengoptimalkan manfaat sumber daya alam, sumber daya manusia, dan iptek dengan mensejajarkan ketiga komponen tersebut, sehingga dapat berkesinambungan. Dalam proses pembangunan pasti ada permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut selalu berubah bahkan cenderung semakin kompleks, seiring bertambahnya tuntutan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tersebut cenderung sukar terwujud jika sumber daya alam sebagai daya dukung pembangunan semakin berkurang dan cenderung terbatas. Penggunaan sumber daya alam secara terus menerus dan melampaui daya dukung lingkungan dalam pelestariannya telah menyebabkan merosotnya kualitas lingkungan dan merusak keseimbangan ekologi lingkungan. Sehingga perlu dilakukan

hambatan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan sektor industri, kendaraan bermotor, konsumsi energi yang terus meningkat telah mengakibatkan bertambahnya kerusakan lingkungan (air, tanah dan udara), seperti tercemarnya pemukiman, terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Oleh karena itu, usaha untuk menjaga lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan menjadi semakin penting untuk dilakukan sehingga kebutuhan kehidupan generasi yang akan datang dapat terpenuhi.

Pada tahun 1983, PBB membentuk Komisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Dunia (World Commission on Environment and Development, WCED). Komisi ini yang akan bertugas menangani berbagai permasalahan yang terkait dengan pembangunan dan lingkungan. Pada tahun 1987, WCED menerbitkan laporan yang berjudul *Our Common Future*, yang menjelaskan hubungan dan keterkaitan global antara ekonomi, sosial, budaya, dan isu-isu lingkungan.

Laporan tersebut mendefinisikan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pembahasan dan pertemuan tingkat dunia terus berlanjut dengan diadakannya United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) di Rio de Janeiro pada bulan Juni 1992 yang mengadopsi agenda untuk lingkungan dan pembangunan di abad ke-21, yang kemudian disebut Agenda 21. Agenda 21 menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan integrasi dari 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menindaklanjuti Agenda 21, UNCED membentuk Komisi Pembangunan Berkelanjutan (Commission on Sustainable Development, CSD) pada Desember 1992. Tahun 2002, sepuluh tahun dari Deklarasi Rio, dilaksanakan konferensi puncak sedunia

kerja *Driving Force-State-Response*. Pada tahun 2001, Divisi Pembangunan Berkelanjutan merevisi 134 indikator pembangunan berkelanjutan tersebut menjadi 58 indikator berdasarkan pengalaman dari beberapa negara yang telah menerapkan indikator tersebut. Indikator tersebut direvisi kembali menjadi 50 indikator utama dan 46 indikator lain pada tahun 2007.

Pada tanggal 2 Agustus 2015, sebanyak 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia, secara aklamasi mengadopsi dokumen berjudul “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” (Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan). Dokumen ini kemudian disahkan oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di KTT Pembangunan Berkelanjutan PBB di New York pada 25-27 September 2015. Dokumen tersebut terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan terbagi menjadi 169 target. *Sustainable Development Goals* (SDG’s) merupakan pembaharuan tujuan dan indikator target universal dari negara anggota PBB yang akan meringkaskan setiap agenda dan kebijakan politik negara selama 15 tahun kedepan. Pada dasarnya SDG’s akan mengikuti dan memperluas pencapaian MDG’s yang telah disetujui sejak tahun 2000 yang akan berakhir di akhir tahun 2015.

B. PEMILIHAN INDIKATOR

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Agenda 21. Sebagai konsekuensinya, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyajikan indikator atau variabel pembangunan berkelanjutan sesuai dengan yang disarankan dan direkomendasikan oleh *United Nation - Commission on Sustainable Development* (UN-CSD). Oleh karena itu kerangka kerja yang digunakan mengacu pada kerangka kerja UN-CSD. Dalam penyajian publikasi Indikator Pembangunan Berkelanjutan ini, tidak semua indikator bisa disajikan karena keterbatasan data yang tersedia di Indonesia. Selain

itu, ada beberapa indikator pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan ketersediaan data di Indonesia (Lampiran 1).

Berikut merupakan penjelasan setiap indikator terpilih dari kerangka kerja CSD yang sudah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan berada di bawah garis kemiskinan. Tujuan dari ukuran kemiskinan adalah untuk memungkinkan adanya perbandingan kemiskinan dan menilai kemajuan upaya pengentasan kemiskinan serta evaluasi program.

2. Distribusi pembagian pengeluaran per kapita dan indeks gini

Indikator ini merupakan suatu ukuran ketimpangan pendapatan atau sumber daya dalam suatu masyarakat. Ketimpangan akibat pendapatan atau konsumsi dan ketidaksetaraan dalam meraih kesempatan menghambat pembangunan manusia dan merugikan pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang.

3. Persentase rumah tangga dengan penampungan akhir tinja tangki septik

Penyediaan sanitasi yang memadai diperlukan untuk melindungi kesehatan manusia serta lingkungan. Indikator ini memantau kemajuan akses rumah tangga pada fasilitas sanitasi, pelayanan sosial dasar yang penting sekaligus merupakan dasar untuk mengurangi risiko dari bakteri faecal (yang terdapat pada kotoran manusia) dan frekuensi penyakit yang terkait.

4. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih

Indikator ini memonitor kemajuan dari akses rumah tangga terhadap sumber air bersih dengan volume yang memadai dan jarak yang terjangkau.

10. **Angka kematian bayi**

Estimasi angka kematian bayi merupakan probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun (dinyatakan per 1000 kelahiran hidup). Tingkat kematian bayi dipengaruhi oleh ketersediaan, akses dan kualitas sarana kesehatan; pendidikan, khususnya ibu-ibu; akses air bersih dan sanitasi; kemiskinan dan gizi.

11. **Angka harapan hidup saat lahir**

Indikator ini merupakan rata-rata umur yang dicapai oleh bayi yang baru lahir yang diharapkan hidup, dengan mengingat adanya risiko kematian pada saat usia tertentu. Angka harapan hidup saat lahir merupakan indikator kematian dan proxy terhadap kondisi kesehatan.

12. **Persentase penduduk yang berobat jalan di puskesmas dan puskesmas pembantu**

Indikator ini mengukur akses penduduk terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

13. **Persentase balita yang diimunisasi**

Indikator ini memantau implementasi dari program imunisasi. Pengelolaan yang baik pada program imunisasi sangat penting untuk mengurangi kesakitan dan kematian dari penyakit menular di masa kanak-kanak.

14. **Persentase wanita usia 15-49 tahun yang menggunakan alat KB**

Indikator ini menunjukkan usaha manusia secara sadar dalam mengontrol kelahiran/ pelayanan kesehatan reproduksi. Meskipun indikator ini tidak dapat mengontrol semua tindakan yang diambil dalam mengontrol kelahiran. Manfaat kesehatan dari penggunaan kontrasepsi meliputi kemampuan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga mengurangi resiko aborsi, potensi komplikasi kehamilan dan resiko kematian ibu.

langsung berpengaruh pada perubahan penduduk. Angka kelahiran total tidak dipengaruhi oleh distribusi umur penduduk. Angka kelahiran yang rendah dapat meningkatkan kemampuan keluarga dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang ada untuk melawan kemiskinan, melindungi dan memperbaiki lingkungan.

25. **Angka beban ketergantungan**

Angka beban ketergantungan menunjukkan perbandingan jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi terhadap penduduk usia muda dan usia tua yang tergantung secara ekonomi. Angka beban ketergantungan dapat mengindikasikan dampak potensial perubahan struktur umur penduduk terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

26. **Jumlah desa menurut jenis bencana dan upaya antisipasi bencana alam**

Indikator ini menggambarkan jumlah desa yang terkena dampak bencana baik yang berupa tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gempa bumi yang disertai tsunami, letusan gunung api, banjir, banjir disertai tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang/abrasi, angin puyuh/puting beliung dan kebakaran hutan. Indikator ini juga menunjukkan kerentanan terhadap bencana alam. Kerentanan yang tinggi ditunjukkan oleh tingginya keterpaparan oleh rupa-rupa kejadian bencana.

27. **Jumlah korban dan kerusakan rumah akibat bencana alam**

Indikator ini memperkirakan dampak ekonomi dan manusia dari bencana. Bencana yang melibatkan bahaya alam dapat memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang yang buruk terhadap masyarakat dan perekonomian negara manapun, serta dapat menghambat berlangsungnya pembangunan berkelanjutan.

28. Emisi gas rumah kaca

Indikator ini mengukur emisi gas rumah kaca yang memiliki dampak langsung terhadap perubahan iklim. Gas-gas rumah kaca yang utama adalah karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄) dan nitrogen oksida (N₂O). Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer berkontribusi terhadap pemanasan global yang merupakan tantangan utama bagi pembangunan berkelanjutan. Indikator ini juga memberikan informasi mengenai pemenuhan komitmen global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

29. Impor komoditi bahan yang mengandung zat perusak ozon

Indikator ini menggambarkan perkembangan dari proses pengurangan bahan perusak ozon (BPO). Tanpa penggunaan BPO akan memperbaiki lapisan ozon, sehingga mengurangi efek buruk pada kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, mikro organisme, kehidupan laut, barang-barang, siklus biogeokimia, dan kualitas udara.

30. Rata-rata bulanan hasil pengukuran konsentrasi gas SO₂ dan NO₂

Indikator ini memberikan ukuran keadaan lingkungan dalam hal kualitas udara dan merupakan ukuran tidak langsung paparan populasi dengan polusi udara yang menjadi perhatian kesehatan di wilayah perkotaan. Meningkatkan kualitas udara merupakan aspek penting dalam mempromosikan pemukiman yang berkelanjutan.

31. Luas lahan sawah

Indikator ini menunjukkan luas lahan yang tersedia untuk produksi pertanian, khususnya tanaman pangan.

32. Luas lahan tegal/kebun dan ladang/huma

Indikator ini menunjukkan luas lahan yang tersedia untuk produksi pertanian, selain tanaman pangan.

33. Luas Lahan yang sementara tidak diusahakan

Indikator ini menunjukkan luas lahan yang tersedia, namun sementara tidak diusahakan, memungkinkan untuk diusahakan lagi.

34. Persentase luas hutan

Indikator ini untuk memantau perubahan luas hutan. Hutan menyediakan banyak sumber daya dan fungsi yang penting termasuk produk kayu dan produk non-kayu, potensi wisata, habitat satwa liar, konservasi keanekaragaman hayati, dan memainkan peran penting dalam siklus karbon global.

35. Jumlah sebaran titik panas yang terdeteksi satelit

Indikator ini merupakan pendekatan dari upaya pencegahan kejadian kebakaran hutan di suatu wilayah. Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab penggundulan hutan, polusi udara dan penipisan lapisan ozon.

36. Jumlah dan persentase desa pesisir

Indikator ini mengukur jumlah dan persentase desa pesisir. Persentase desa pesisir yang tinggi meningkatkan kerentanan terhadap kenaikan permukaan laut dan bahaya pesisir lainnya seperti badai dan tsunami.

37. Sebaran kawasan konservasi laut

Indikator ini menunjukkan luas wilayah konservasi laut dan sebarannya. Konservasi wilayah laut sangat penting untuk menjaga keanekaragaman ekosistem laut, dalam kaitannya dengan manajemen pengaruh manusia terhadap lingkungannya.

38. Luas dan kondisi terumbu karang

Indikator ini menggambarkan efektifitas kebijakan nasional yang dirancang untuk mengkonservasi keanekaragaman

dan ekologi wilayah, dalam kaitannya dengan manajemen pengaruh manusia terhadap lingkungannya.

43. Spesies satwa dan tumbuhan yang dilindungi

Indikator ini memungkinkan memonitor seberapa banyak spesies satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Indikator ini menggambarkan efektifitas kebijakan nasional yang dirancang untuk membatasi hilangnya keanekaragaman hayati.

44. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

Indikator ini merupakan indikator dasar pertumbuhan ekonomi dan mengukur tingkat serta jumlah output ekonomi. Hal ini menunjukkan perubahan pada jumlah produksi barang dan jasa.

45. Tabungan bruto menurut sektor

Indikator ini menunjukkan seberapa banyak tabungan bruto yang dimiliki oleh negara sebagai cadangan untuk keberlanjutan pembangunan. Tabungan bruto merupakan penghitungan dari pendapatan nasional bruto dikurangi total konsumsi ditambah transfer netto.

46. Pembagian investasi dalam Produk Domestik Bruto

Rasio investasi memberikan indikasi kepentingan relatif dari sisi lain investasi, misalnya, konsumsi. Akuisisi barang modal memberikan informasi penting tentang kinerja ekonomi masa depan masyarakat dengan memperluas dan memperdalam modal saham. Indikator ini menunjukkan kontribusi investasi terhadap pembentukan produk domestik bruto.

47. Laju inflasi

Indikator ini mengukur laju inflasi, dimana jika nilainya terlalu tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tak diinginkan sering menimbulkan efek berantai, seperti mengurangi pendapatan riil dari yang

memberantas kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

52. Persentase rumah tangga yang mengakses internet

Jumlah pengguna internet adalah ukuran yang menggunakan dan mengakses internet. Internet dan penggunaannya memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan informasi dengan mudah.

53. Persentase rumah tangga yang memiliki telpon dan telpon seluler

Indikator ini merupakan salahsatuukuran untuk melihat perkembangan telekomunikasi di suatu negara. Telekomunikasi berhubungan erat dengan pembangunan sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Hal ini juga merupakan faktor penting untuk berbagai kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertukaran informasi antar warga. Komunikasi modern relatif ramah lingkungan, karena merupakan pengganti potensial untuk transportasi dan tingkat pencemaran lingkungan yang relatif rendah.

54. Dampak pariwisata terhadap produk domestik bruto

Indikator ini bertujuan untuk mengukur peranan pariwisata terhadap perekonomian indonesia dengan menggunakan model Input-Output berupa matriks *supply* (penyediaan/ penawaran) dan *demand* (permintaan), yang menggambarkan keseimbangan transaksi ekonomi antara industri pariwisata dengan wisatawan dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Meningkatnya jumlah wisatawan memberikan dampak bagi pertumbuhan industri pariwisata.

55. Persentase transaksi berjalan terhadap produk nasional bruto

Transaksi berjalan merupakan catatan gabungan dari neraca perdagangan, neraca jasa, pendapatan dan transfer berjalan. Transaksi berjalan merupakan bagian pengukuran

60. **Pemakaian energi**

Indikator ini mengukur tingkat penggunaan energi dan mencerminkan pola energi yang digunakan dalam kegiatan ekonomi dan sektor-sektor yang lain. Energi merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan memberikan layanan penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Disisi lain penggunaan energi telah mengakibatkan tekanan besar terhadap lingkungan yaitu menguras sumber daya dan menimbulkan polusi.

61. **Jumlah kendaraan bermotor**

Indikator ini memberikan informasi mengenai pentingnya alternatif moda transportasi. Penggunaan mobil pribadi untuk transportasi secara umum kurang efisien dan memiliki dampak lingkungan dan sosial yang lebih besar, seperti polusi, pemanasan global serta tingginya tingkat kecelakaan dibandingkan dengan angkutan massal.

62. **Produksi angkutan kereta api penumpang dan barang**

Indikator ini menunjukkan kontribusi kereta api sebagai angkutan penumpang dan barang yang merupakan bagian dari salah satu moda transportasi darat. Penggunaan angkutan kereta api lebih hemat energi dibanding dengan moda transportasi jalur jalan raya. Penggunaan energinya ditunjukkan dengan banyaknya penumpang per km atau barang per ton km.

C. KEMISKINAN.

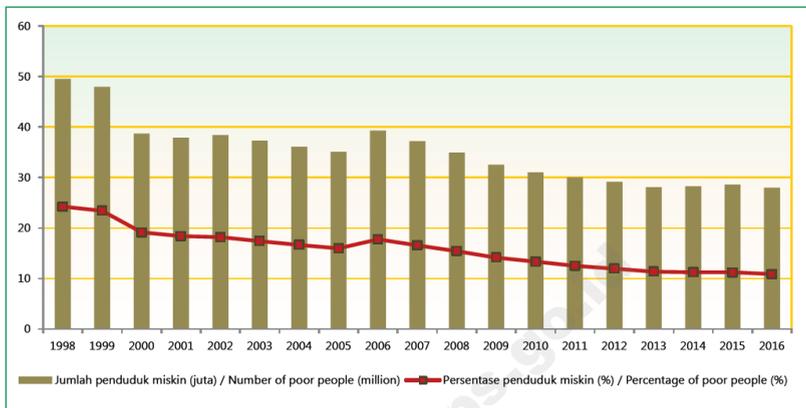
Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan

mengatasi kemiskinan yang sudah pernah dilakukan, diantaranya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Statistik kemiskinan penting untuk menganalisis hubungan antara pendapatan atau konsumsi terhadap dimensi lain dari perkembangan manusia seperti pendidikan, kesehatan, keahlian kerja dan ukuran standar hidup lainnya. Ukuran kemiskinan dapat pula digunakan untuk memantau potensi kerusakan sumber daya alam di suatu wilayah karena penduduk miskin pada umumnya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarnya untuk membiayai kebutuhan hidup.

Tingkat kemiskinan di Indonesia dihitung menggunakan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran atau konsumsi rumah tangga. Secara umum, perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi selama periode 1998-2016 (Gambar 4.1).

Gambar 4.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 1998-2016
Figure 4.1. Number and Percentage of Poor People, 1998-2016



Sumber : BPS 2016.

Jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan selama periode 1998- 2005, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2006 dan kembali menurun pada periode 2007-2016. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2006 disebabkan oleh kenaikan BBM yang tinggi yang berdampak pada harga kebutuhan pokok masyarakat.

Dengan menggunakan standar kemiskinan yang disempurnakan, jumlah penduduk miskin tersebut terus berkurang hingga menjadi 28,07 juta jiwa (11,37 persen) pada tahun 2013 (Tabel 4.1.1 dan Tabel 4.1.2). Namun pada tahun 2014- 2015 jumlah penduduk miskin meningkat kembali menjadi sebesar 28,28 juta jiwa pada tahun 2014 dan 28,59 juta jiwa pada tahun 2015. Tetapi pada tahun 2016 kembali menurun menjadi 28 juta jiwa. Provinsi dengan presentase penduduk miskin terbesar adalah Provinsi Papua (28,54 persen), diikuti oleh Provinsi Papua Barat (25,43 persen) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (22,19 persen). Berdasarkan persentase penduduk miskin nasional maka terdapat 14 provinsi yang memiliki persentase lebih tinggi dari persentase kemiskinan nasional.

Garis kemiskinan (GK) menentukan jumlah penduduk miskin, yaitu dengan menghitung jumlah penduduk dengan pengeluaran berada di bawah garis kemiskinan. Nilai garis kemiskinan setiap tahun selalu mengalami kenaikan (Tabel 4.1.3).

Pada tahun 2010, nilai garis kemiskinan Indonesia adalah Rp. 211.726,- per kapita per bulan dan pada tahun 2016 nilai garis kemiskinan naik menjadi Rp. 354.386,- per kapita per bulan.

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Indeks gini juga

pengawasan penyediaan air minum masyarakat, pembuangan tinja dan air limbah, pembuangan sampah, vektor penyakit, kondisi perumahan, penyediaan dan penanganan makanan, kondisi atmosfer dan keselamatan lingkungan kerja. Dari definisi tersebut, tampak bahwa sanitasi lingkungan ditujukan untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat dan nyaman.

Sanitasi dan air minum yang layak memberi kontribusi langsung terhadap kualitas kehidupan manusia di seluruh siklus kehidupannya, mulai dari bayi, Balita, anak sekolah, remaja, kelompok usia kerja, ibu hamil dan kelompok lanjut usia. Perwujudan manusia Indonesia yang berkualitas merupakan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Nawacita kelima yaitu “meningkatkan kualitas manusia Indonesia”. Sanitasi yang layak juga menjadi kunci pengentasan kemiskinan terutama di negara berkembang, seperti Indonesia.

KTT tentang pembangunan berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002 (Konferensi Rio+10) merekomendasikan setiap negara untuk mengurangi separuh jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi dasar pada tahun 2015 yang tertuang dalam Johannesburg Plan of Implementation (JPOI). Target tersebut juga seiring dengan target sanitasi dalam MDGs.

Menurut data dari WHO/UNICEF dalam Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation, masih ada 2,4 miliar penduduk dunia yang tidak memiliki akses pada sanitasi yang baik pada tahun 2015. Dari jumlah tersebut, 28 persen menggunakan fasilitas sanitasi publik atau bersama, 31 persen menggunakan fasilitas sanitasi yang tidak memenuhi standar kesehatan dan 41 persen sisanya tidak memiliki fasilitas sanitasi sama sekali dan terpaksa menggunakan area terbuka yang tidak higienis. Di negara berkembang, persentase penduduk yang memiliki akses pada sanitasi yang baik pada tahun 2015 sebesar 62 persen. Jika perkembangan ini terus berlanjut seperti kondisi sekarang, maka target sanitasi dalam JPOI dan MDGs tidak akan tercapai yaitu

Penggunaan bahan bakar padat dalam rumah tangga seperti kayu bakar mengindikasikan kurangnya akses terhadap energi modern, seperti gas dan LPG. Penggunaan bahan bakar biomassa tradisional seperti kayu dapat menyebabkan polusi udara dalam ruangan. Hal ini dapat meningkatkan risiko kematian karena pneumonia dan infeksi saluran pernafasan akut. Tingginya permintaan bahan bakar biomassa untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi lahan.

Secara nasional, persentase rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar memasak menurun pada periode 2010-2015 yaitu dari 42,33 persen di tahun 2010 menjadi 24,40 persen di tahun 2015 (Tabel 4.1.8). Penurunan tersebut sejalan dengan meningkatnya sosialisasi penggunaan gas dan LPG sebagai bahan bakar untuk memasak. Jika dilihat berdasarkan provinsi, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua merupakan provinsi dengan persentase rumah tangga terbesar yang menggunakan kayu bakar yaitu masing-masing sebesar 78,17 persen dan 67,74 persen

Kemiskinan telah memaksa jutaan orang untuk menjadi tunawisma dan tinggal di tempat yang tidak ideal. Kondisi tempat tinggal yang ideal ditandai dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu padat, perumahan yang layak, kecukupan air bersih, akses sanitasi yang layak, serta sarana dan prasarana ekonomi, sosial maupun budaya yang memadai. Namun jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada munculnya permukiman kumuh. Kondisi kehidupan di permukiman kumuh menggambarkan kemiskinan dari segi pendapatan yang tidak memadai dan lingkungan yang tidak layak. Permukiman kumuh memberikan tekanan besar terhadap kehidupan masyarakat melalui polusi, kebisingan, kelangkaan air bersih, dan banjir.

Permukiman kumuh muncul karena tingginya tingkat urbanisasi dan mahalnya lahan permukiman. Daya tarik kota

sebagai pusat pelayanan, pendidikan, dan kegiatan perekonomian dengan berbagai kelengkapan fasilitasnya mendorong masyarakat berdatangan ke kota. Penambahan jumlah penduduk yang tinggi di daerah perkotaan dengan tidak diimbangi penambahan perumahan, serta terbatasnya lahan yang tersedia merupakan salah satu pendorong munculnya permukiman kumuh.

Menurut Bank Dunia (1999), wilayah kawasan kumuh merupakan bagian yang terabaikan dalam pembangunan perkotaan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sosial demografis di kawasan kumuh seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat, serta minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana sosial lainnya. Semakin banyak permukiman kumuh dan munculnya permukiman kumuh baru dapat memberikan tekanan terhadap lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Permukiman kumuh merupakan tantangan besar bagi kelestarian lingkungan dalam konteks pembangunan.

Jumlah penghuni kawasan kumuh makin meningkat karena adanya arus urbanisasi yang meningkat pula secara cepat. Sekitar seperempat penduduk perkotaan dunia hidup di daerah kumuh. Jumlah penghuni kawasan kumuh di negara berkembang meningkat dari 689 juta pada tahun 1990 menjadi 880 juta pada tahun 2014, menurut UN World Cities Report 2016.

Pada tahun 2014, terdapat sebanyak 4.508 desa atau 5,48 persen desa dengan keberadaan permukiman kumuh. Persentase desa dengan keberadaan permukiman kumuh paling tinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 20,26 persen atau sebanyak 1.208 desa dari 5.962 desa (Tabel 4.1.9).

D. KEPERINTAHAN

Menurut UNDP (1997), tata kelola pemerintahan dapat diartikan sebagai penggunaan kewenangan ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkatan. Tata kelola pemerintahan mencakup mekanisme, proses, dan institusi di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat menyuarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajibannya, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Tanpa adanya tata kelola pemerintahan yang baik, skema pembangunan yang direncanakan tidak akan membawa perbaikan dalam kualitas hidup warga negara.

Kebijakan pemerintah dalam tata kelola pemerintahan yang baik berorientasi pada pembangunan berkelanjutan secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Dalam kebijakan keuangan negara, tata kelola pemerintahan yang baik harus bertanggung jawab dan transparan terhadap publik, dalam hal ini warga negara. Kebijakan keuangan yang dimaksud terkait dengan pengadaan dana (kebijakan perpajakan yang adil, kebijakan hutang, dll) dan penggunaan dana (perencanaan anggaran, implementasi anggaran, dll), serta pemantauan pengadaan dan penggunaan dana oleh parlemen dan badan pengaudit nasional.

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan seringkali menghadapi kendala-kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah terjadinya praktek penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara atau yang sering disebut Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Praktek KKN membuat negara mengalami kerugian dan kemajuan ekonomi terhambat.

Semakin maraknya praktek KKN mendorong berkembangnya tuntutan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN. Indikator prevalensi korupsi di antara pejabat pemerintah dan swasta merupakan satu ukuran tindak kejahatan. Penurunan indikator ini mengindikasikan terjadinya penurunan

terjadi tindak kriminalitas, maka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dapat terganggu. Kriminalitas merupakan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat yang aman, tenteram, dan damai. Kriminalitas juga diyakini memiliki dampak besar pada stabilitas wilayah, pembangunan ekonomi, pendidikan, integrasi sosial, dan persepsi kualitas hidup.

Kasus kriminalitas merupakan sebuah fenomena yang terjadi akibat ketidakseimbangan pembangunan sosial-ekonomi dan belum meratanya tingkat kesejahteraan di kalangan masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kriminalitas di Indonesia adalah jumlah kasus pembunuhan. Pembunuhan yang disengaja serta kejahatan kekerasan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Fenomena kejahatan yang sering terjadi dapat menciptakan iklim ketakutan dan mengikis kualitas hidup. Indikator ini dapat digunakan sebagai ukuran untuk kepatuhan terhadap aturan hukum dan komponen tata pemerintahan yang baik.

Selama periode 2010-2015 jumlah kasus pembunuhan cenderung mengalami penurunan dari 1.606 kasus pada tahun 2010 menjadi 1.491 kasus pada tahun 2015 (Tabel 4.2.2).

Pada tahun 2015, jumlah kasus pembunuhan paling banyak terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yaitu sebesar 161 kasus pembunuhan, kemudian di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu sebanyak 118 kasus pembunuhan. Sedangkan jumlah kasus pembunuhan paling sedikit terdapat di wilayah Kepolisian Daerah Papua Barat (1 kasus).

E. Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun

penyediaan makanan dan perawatan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup bayi maupun sebagai dasar untuk hidup sehat.

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia, selama lima tahun terakhir (2012-2016), angka kematian bayi secara nasional selalu mengalami penurunan (Tabel 4.3.1).

Pada tahun 2012 angka kematian bayi tercatat sebesar 28 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2016, angka tersebut turun menjadi sekitar 26 kematian bayi dalam 1.000 kelahiran hidup. Provinsi dengan estimasi angka kematian bayi paling rendah pada tahun 2016 adalah DI Yogyakarta yaitu sekitar 13 kematian bayi dalam 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan estimasi AKB tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 50 kematian bayi dalam 1.000 kelahiran hidup (Gambar 4.4).

Indikator lain yang menggambarkan kondisi kesehatan dan tingkat kematian pada suatu negara adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup mengukur berapa tahun suatu kelompok umur tertentu diharapkan hidup dengan mempertimbangkan risiko kematian spesifik pada kelompok umur tertentu. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan program pemberantasan kemiskinan.

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, angka harapan hidup penduduk Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan selama periode 2011-2015, mulai dari 70,0 tahun pada tahun 2011 menjadi 70,8 tahun di tahun 2015 (Tabel 4.3.2). Hal ini menunjukkan bahwa anak yang lahir pada tahun 2015 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 70,8 tahun.

Jika dilihat menurut provinsi, terdapat sebanyak 20 provinsi mempunyai estimasi angka harapan hidup di bawah

70 tahun dan sebanyak 13 provinsi mempunyai estimasi angka harapan hidup di atas 70 tahun. Estimasi angka harapan hidup tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (74,6 tahun), sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Barat (63,9 tahun).

2. Layanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan merupakan upaya yang diselenggarakan sendiri/ secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Pelayanan kesehatan utama yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah pelayanan kesehatan dasar, khususnya untuk ibu dan balita. Pelayanan kesehatan mencakup semua jasa yang berhubungan dengan diagnosis dan pengobatan penyakit, pemeliharaan, dan pemulihan kesehatan. Aksesibilitas pelayanan kesehatan mencerminkan adanya peningkatan sistem pelayanan kesehatan dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), persentase penduduk yang berobat jalan di puskesmas dan puskesmas pembantu selama periode tahun 2010-2015 mengalami fluktuasi, dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 35,12 persen sementara persentase terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 27,12 persen dan kembali meningkat pada 2015 sebesar 29,79 persen (Tabel 4.3.3).

Pada tahun 2015, persentase tertinggi penduduk yang berobat jalan ke puskesmas dan puskesmas pembantu terjadi di Provinsi Papua yaitu sebesar 63,53 persen. Sementara Bali merupakan provinsi dengan persentase terkecil yaitu 18,69 persen Indikator penting lain dalam pembangunan di bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan reproduksi dan

manusia; 2) Perhatian khusus pada gizi berdampak langsung pada keuntungan di bidang pertanian dengan peningkatan produksi untuk penyediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan dengan mempertahankan makanan berbasis pangan lokal; 3) Perbaikan gizi merupakan langkah awal dalam pengembangan SDM dan penurunan kemiskinan; 4) Gizi yang cukup dapat memperbaiki kondisi pasca konflik; 5) Program perbaikan gizi merupakan sebuah proses partisipasi yang mengedepankan HAM; dan 6) Gizi yang cukup meningkatkan imunitas dan berperan pada pencegahan penyakit tidak menular (PTM).

Apabila semua penduduk suatu bangsa memperoleh gizi yang cukup, maka akan terlahir sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu kebijakan pembangunan terkait perbaikan gizi perlu segera dilakukan. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari Kementerian Kesehatan, diketahui bahwa jumlah balita yang menderita gizi buruk mengalami peningkatan dari 5,40 persen pada tahun 2007 menjadi 5,70 persen pada tahun 2013. Begitu pula dengan balita yang mengalami gizi kurang, naik dari 13,00 persen pada tahun 2007 menjadi 13,90 persen pada tahun 2013 (Tabel 4.3.6).

Jumlah balita kurang gizi (gizi buruk ditambah gizi kurang) naik dari 18,4 persen pada tahun 2007 menjadi 19,6 persen pada tahun 2013. Walaupun keadaan ini sempat turun di tahun 2010 menjadi 17,9 persen. Adanya kenaikan persentase balita yang kurang gizi diiringi dengan penurunan persentase balita yang bergizi normal dan bergizi lebih. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas gizi balita di Indonesia masih sedikit mengalami penurunan sehingga keadaan ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

Pada tahun 2013, provinsi dengan persentase balita yang menderita gizi buruk paling tinggi adalah Provinsi Papua Barat

menjadi 252.027 pada tahun 2014. Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat merupakan provinsi endemik malaria, hal ini dibuktikan dengan jumlah penderita malaria yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan provinsi lain selama periode tahun 2010-2014.

F. PENDIDIKAN

Pendidikan mempunyai peran utama untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tidak hanya sebagai aspek pembangunan, pendidikan merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat pendidikan satu bangsa mengindikasikan tingkat kemajuan dari bangsa tersebut. Untuk itu pemerintah perlu membuat kebijakan dan program yang tepat sasaran di bidang pendidikan seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan agar seluruh masyarakat dapat menikmati pendidikan secara merata yang secara tidak langsung akan menjamin masa depan bangsa.

Salah satu tujuan pembangunan di bidang pendidikan yang merupakan target nasional dalam SDGs yaitu menyelesaikan pendidikan dasar dengan mampu membaca, menulis dan berhitung cukup baik untuk memenuhi standar pembelajaran minimum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan.

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengembangkan potensi kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, Bab II Pasal III yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dalam

yang cukup signifikan dibandingkan dengan APM SD yang cenderung stagnan (Gambar 4.6.).

Secara nasional nilai APM SD pada tahun 2015 sebesar 96,70 persen dan APM SMP sebesar 77,80 persen (Tabel 4.4.2 dan 4.4.3). Pada tahun 2015, Provinsi DI Yogyakarta adalah provinsi dengan nilai APM SD paling tinggi yaitu sebesar 99,20 persen, sedangkan nilai APM SD yang paling rendah adalah Provinsi Papua (78,60 persen). Untuk APM SMP, provinsi dengan nilai tertinggi pada tahun 2015 adalah Provinsi Aceh (85,6 persen) dan APM SMP terendah adalah Provinsi Papua (54,1 persen). Indikator lain yang menunjukkan keberhasilan pencapaian pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk usia kerja. Indikator tersebut menunjukkan kualitas modal sumber daya manusia pada usia kerja.

Penduduk usia kerja dengan ijazah minimal SMA diharapkan memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki pasar tenaga kerja sehingga secara tidak langsung akan menurunkan tingkat pengangguran. Persentase penduduk usia 25-64 tahun dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SMA selama periode 2010-2015 menunjukkan peningkatan (Tabel 4.4.4). Secara nasional, persentase penduduk usia 25-64 tahun yang berpendidikan minimal SMA pada tahun 2015 tercatat sebesar 34,62 persen, di mana persentase terbesar terdapat di Provinsi DKI Jakarta (62,75 persen) dan persentase terkecil terdapat di Provinsi Sulawesi Barat (25,91 persen).

2. Melek Huruf

Menurut UNESCO melek aksara atau melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan

G. DEMOGRAFI

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Menempati urutan ke empat setelah China, India dan Amerika Serikat. Menurut PBB, pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 257,56 juta orang atau sekitar 3,50 persen dari keseluruhan jumlah penduduk dunia.

Jumlah penduduk yang besar yang dimiliki oleh Indonesia merupakan salah satu modal pembangunan sehingga harus ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya agar bermanfaat bagi pembangunan. Namun juga dapat menimbulkan masalah seperti pemukiman, penyediaan lapangan pekerjaan, sumber makanan dan lain sebagainya. Penduduk adalah subyek dan sekaligus menjadi obyek pembangunan.

Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dididik, dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebagai objek pembangunan, penduduk juga harus dapat menikmati hasil dari pembangunan. Dengan demikian pembangunan harus memperhitungkan kemampuan penduduk sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan. Pembangunan dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang seluas-luasnya. Keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan menjadi modal dan pendorong bagi pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika kualitasnya rendah, penduduk tersebut justru akan membebani pembangunan.

Salah satu permasalahan di bidang kependudukan adalah besarnya jumlah penduduk dan sebarannya yang tidak merata. Permasalahan tersebut telah mengakibatkan tidak meratanya hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Rate/TFR). Angka kelahiran total menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya.

Perkembangan estimasi angka kelahiran total selama periode tahun 2012-2016 cenderung tetap yaitu 2,4. Pada tahun 2016, estimasi angka kelahiran total Indonesia adalah 2,4 yang berarti secara rata-rata wanita Indonesia usia 15-49 tahun mempunyai 2 atau 3 anak selama masa usia subur. Jika dilihat berdasarkan provinsi, terdapat beberapa provinsi dengan estimasi angka kelahiran total dibawah 2, yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta (Tabel 4.5.2).

Penurunan angka kelahiran total dapat menyebabkan perubahan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan akan mempengaruhi angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan mengindikasikan dampak potensial dari perubahan struktur umur penduduk terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Angka beban ketergantungan yang kecil akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif (kelompok umur 15-64 tahun) untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Angka beban ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk usia produktif menghadapi beban yang lebih besar untuk mendukung dan memberikan layanan sosial yang dibutuhkan oleh penduduk tidak produktif (anak-anak dan orang tua) yang sering tergantung secara ekonomi.

Pada tahun 2012, angka beban ketergantungan tercatat sebesar 50,1, yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 50 orang penduduk usia tidak produktif. Pada tahun 2016, angka beban ketergantungan turun menjadi 48,3, yang berarti ada penurunan beban tanggungan pada setiap penduduk usia produktif (Gambar 4.8).

Angka beban ketergantungan tertinggi pada tahun 2016 terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu mencapai angka

Indonesia termasuk wilayah yang rawan bencana alam. Gejala atau peristiwa alam yang sering terjadi antara lain gunung meletus, banjir, gempa bumi, badai atau angin topan, tsunami, kekeringan dan tanah longsor.

Pemanasan global dan perubahan iklim yang disertai dengan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dapat meningkatkan potensi terjadinya bencana alam/lingkungan. Bencana alam juga dapat disebabkan oleh kerusakan hutan dan lahan, pelanggaran tata ruang, dan kegiatan industri yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun.

Bencana alam erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan faktor lingkungan akan memperbesar risiko terjadinya bencana alam. Bencana alam juga akan menghambat jalannya proses pembangunan. Untuk itu upaya pencegahan dan mitigasi bencana harus dilakukan, untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam.

Bencana alam yang dibahas dalam subbab ini adalah bencana banjir, gempa bumi dan tanah longsor. Banjir merupakan kejadian bencana alam yang paling banyak menimpa desa-desa di Indonesia, diikuti oleh tanah longsor dan gempa bumi.

Selama periode tahun 2008 sampai 2014, jumlah desa yang mengalami bencana banjir tercatat berfluktuatif yaitu sebanyak 15.143 desa pada tahun 2008, kemudian menurun menjadi 14.732 desa pada tahun 2011 dan naik menjadi 16.830 desa pada tahun 2014 (Tabel 4.6.1).

Provinsi dengan jumlah desa yang mengalami kejadian bencana banjir tertinggi pada tahun 2014 adalah Provinsi Aceh (1.649 desa), diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (1.273 desa) dan Jawa Timur (1.218 desa). Sedangkan provinsi dengan jumlah desa yang mengalami kejadian bencana banjir terendah yaitu Kepulauan Riau (51 desa). Indonesia terletak di daerah dengan tingkat aktivitas gempa bumi yang cukup tinggi. Hal tersebut sebagai akibat

270.585 rumah, dengan perincian rusak berat sebanyak 81.733 rumah, dan rusak ringan tercatat sebanyak 188.852 rumah. Pada tahun 2015, jumlah rumah yang mengalami rusak berat sebagian besar terjadi di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yaitu berturut-turut sebanyak 4.019 rumah, 2.652 rumah dan 1.959 rumah (Tabel 4.6.4).

I. ATMOSFIR.

Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi dengan ketinggian yang tidak terdefinisi. Atmosfer memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan dan kelestarian bumi, karena atmosfer dapat melindungi bumi dari jatuhnya benda angkasa dan pancaran radiasi sinar matahari secara langsung. Kerusakan lapisan atmosfer bumi dapat berakibat pada pemanasan global (global warming) yang saat ini menjadi masalah besar yang sedang dihadapi oleh seluruh penduduk di dunia.

Menurut beberapa ilmuwan, pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca (GRK) adalah gas-gas di atmosfer yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan menahan radiasi matahari yang dipantulkan oleh bumi, sehingga menyebabkan suhu di permukaan bumi semakin meningkat.

Menurut konvensi PBB mengenai perubahan iklim (United Nation Framework Convention on Climate Change-UNFCCC), ada 6 jenis gas yang digolongkan sebagai gas rumah kaca, antara lain: karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitro oksida (N₂O), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorokarbon (PFCs), dan sulfur heksafluorida (SF₆).

1. Emisi Karbon dioksida (CO₂)

Meningkatnya jumlah gas karbon dioksida (CO₂) di atmosfer merupakan penyebab utama terjadinya pemanasan global. CO₂ juga merupakan penyumbang utama dari gas rumah kaca sebagai akibat dari kegiatan pembakaran bahan bakar fosil di sektor energi, industri, transportasi, deforestasi dan pertanian.

Meningkatnya konsentrasi gas CO₂ di atmosfer dapat menimbulkan efek negatif bagi kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan di berbagai negara di dunia. Perkiraan emisi CO₂ yang dihitung dalam publikasi ini adalah emisi CO₂ dari bahan bakar memasak dan emisi CO₂ dari kendaraan bermotor. Perkiraan emisi CO₂ dari bahan bakar memasak oleh rumah tangga dihitung berdasarkan emisi dari penggunaan bahan bakar gas, minyak tanah dan kayu bakar yang digunakan untuk memasak.

Pada rentang tahun 2012-2014, perkiraan emisi CO₂ dari bahan bakar gas untuk memasak naik sebesar 3,14 juta ton, yaitu dari 14,94 juta ton pada tahun 2012 menjadi 18,08 juta ton pada tahun 2014, atau naik sekitar 17 persen dibandingkan tahun 2012. Pada periode yang sama, perkiraan emisi CO₂ dari bahan bakar minyak tanah untuk memasak mengalami penurunan sebesar 0,86 juta ton atau turun sebesar 29,7 persen. Sementara emisi CO₂ yang dihasilkan dari kayu bakar untuk memasak mengalami kenaikan yaitu sebesar 4.43 juta ton atau sebesar 0,26 persen.

Perkiraan emisi CO₂ yang berasal dari penggunaan kendaraan bermotor dikontribusikan oleh emisi CO₂ yang berasal dari pemakaian bahan bakar bensin dan solar. Emisi CO₂ yang berasal dari kendaraan bermotor dalam rentang tahun 2010-2014 cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Emisi CO₂ dari

ternak yang tertinggi pada tahun 2015 terdapat di Provinsi Jawa Timur (383,83 ribu ton), sedangkan emisi CH₄ dari hewan unggas yang tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat (14,62 ribu ton).

3. Bahan Perusak Ozon

Ozon (O₃) merupakan lapisan yang berisi gas yang secara alami berada di dalam atmosfer yang berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari. Rusaknya lapisan ozon juga dapat menyebabkan pemanasan global. Lapisan ozon menyerap hampir 90 % sinar ultraviolet Tipe A dan Tipe B dari matahari. Sinar Ultraviolet Tipe B sangat berbahaya karena radiasinya dapat membunuh makhluk hidup dan merusak kerak bumi.

Rusaknya atau menipisnya lapisan ozon diakibatkan oleh meningkatnya penggunaan atau produksi barang yang mengandung bahan kimia seperti klorin dan bromida yang lebih dikenal dengan Bahan Perusak Ozon (BPO). Sampai saat ini bahan perusak ozon (BPO) masih digunakan secara luas pada berbagai kegiatan industri dan domestik. BPO masih banyak digunakan pada produk-produk aerosol, foam, halon, metal bromide, refrigasi, dan pelarut.

Jenis BPO ditentukan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 03/M-DAG/PER/1/2012. Walaupun sudah ada larangan untuk menggunakan BPO, tetapi masih ada yang mengimpor BPO dalam jumlah terbatas, seperti terlihat pada Tabel 4.7.4.

4. Konsentrasi Gas SO₂ dan NO₂

Konsentrasi gas SO₂ dan NO₂ di udara merupakan salah satu indikator yang memberikan ukuran kondisi kualitas udara. Selain itu, konsentrasi gas SO₂ dan NO₂ secara tidak langsung mengukur tingkat paparan penduduk terhadap polusi udara khususnya di daerah perkotaan. Pengukuran rata-rata bulanan

dan lingkungan hidup, sehingga kebakaran hutan bukan saja berakibat buruk terhadap hutan dan lahannya sendiri, tetapi lebih jauh akan mengakibatkan terganggunya proses pembangunan. Kejadian kebakaran hutan di Indonesia cenderung meningkat selama beberapa tahun ini. Sebagian besar kebakaran tersebut disebabkan oleh kesengajaan manusia, seperti pembangunan hutan tanaman industri, pembangunan perkebunan, perambah hutan dan peladang yang mempersiapkan lahannya, dan sebagainya.

Pemantauan kerawanan hutan terhadap kejadian kebakaran hutan dapat dideteksi melalui jumlah sebaran titik panas (*hotspot*). Menurut LAPAN (2004), titik panas adalah parameter yang diturunkan dari data satelit dan diindikasikan sebagai lokasi kebakaran hutan dan lahan. Pemantauan titik panas adalah salah satu kegiatan pengendalian kebakaran lahan/hutan dengan melakukan deteksi titik panas melalui bantuan Citra Satelit dengan teknologi komputer dan perangkat *Geographic Information System* (GIS) untuk mendapatkan data lokasi terjadinya titik panas/kebakaran.

Selama periode 2010-2014, jumlah sebaran titik panas berfluktuatif dengan jumlah titik panas paling banyak terjadi pada tahun 2012 (34.789 titik panas) dan paling sedikit pada tahun 2010 (9.880 titik panas) (Tabel 4.8.6). Pada tahun 2014, terdapat sebanyak 31.266 titik panas yang sebagian besar terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah (5.434 titik panas), Kalimantan Barat (5.381 titik panas), dan Riau (4.400 titik panas).

L. LAUT DAN PESISIR.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang ke dua di dunia serta luas wilayah laut mencapai hampir dua pertiga dari total wilayah. Potensi sumber daya pesisir dan lautan yang besar ini merupakan sumber daya bagi pembangunan nasional. Secara umum, laut merupakan pendukung

Kawasan konservasi laut tersebut terdiri dari cagar alam (5 unit), suaka margasatwa (4 unit), taman wisata alam (14 unit), dan taman nasional (7 unit). Masing - masing kawasan konservasi mempunyai luas yang berbeda-beda, untuk kawasan cagar alam mempunyai luas 152,61 ribu hektar, suaka margasatwa 5,59 ribu hektar, taman wisata alam 491,25 ribu hektar, dan taman nasional 4,04 juta hektar. Kawasan konservasi laut terluas terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara (1,51 juta hektar), diikuti oleh Provinsi Papua (1,45 juta hektar).

3. Terumbu Karang

Terumbu karang merupakan ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang membentuk struktur semacam batu kapur yang menjadi habitat hidup berbagai hewan laut. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem khas yang terdapat di wilayah pesisir dan laut tropis. Terumbu karang memiliki peranan yang sangat besar, seperti sebagai habitat untuk daerah asuhan (*nursery ground*), tempat mencari makan (*feeding ground*), dan sebagai tempat pemijahan (*spanning ground*) bagi berbagai biota yang hidup di terumbu karang atau sekitarnya. Ekosistem terumbu karang dikenal memiliki spesies yang bernilai ekonomis tinggi. Hal ini disebabkan oleh besarnya variasi habitat yang terdapat di dalam ekosistem terumbu karang.

Terumbu karang dunia berisiko mengalami bahaya besar menjadi putih, terutama terjadi pada terumbu karang di Pasifik, Atlantik dan Karibia. Pemutihan terumbu karang adalah fenomena alam yang membuat terumbu karang memutih atau memudar warnanya karena suhu air laut yang terus menerus meningkat di atas rata-rata. US *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) memperingatkan hal ini akan mempengaruhi lebih dari 38 persen terumbu karang di dunia

dan membunuh lebih dari 12.000 kilometer persegi terumbu karang.

Terumbu karang mengalami berbagai ancaman termasuk polusi, pengambilan ikan yang berlebihan, sedimentasi dan kerusakan akibat perahu dan pariwisata. Pemutihan terumbu karang yang terjadi di dunia saat ini diperkirakan yang terburuk dalam catatan karena adanya El Nino (www.bbc.com) Luas terumbu karang di Indonesia pada tahun 2015 tercatat seluas 2,34 juta hektar. Dari luas terumbu karang yang teridentifikasi, terumbu karang yang berada dalam kondisi baik mencapai 30,84 persen, kondisi sedang 20,35 persen, dan kondisi rusak mencapai 33,93 persen. Selain itu, terdapat terumbu karang yang tidak diketahui kondisinya yaitu sekitar 14,88 persen (Tabel 4.9.3).

M. AIR.

Air adalah sumber daya yang paling penting bagi umat manusia, hal ini juga terkait dengan kegiatan di sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Peran air ini yang kemudian diangkat menjadi tema Hari Air Sedunia 2015, "*Water and Sustainable Development*" (Air dan Pembangunan Berkelanjutan). Hal ini mengingatkan air memiliki peran yang penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan air terkait dengan semua aspek yang dibutuhkan untuk menciptakan masa depan yang diinginkan.

Pentingnya peranan air bagi kehidupan, Sustainable Development Goals (SDGs) memasukkan ke dalam indikator pada tujuan 6 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Salah satu indikator pada tujuan tersebut dalam SDGs yaitu proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. Namun data tersebut belum tersedia saat ini, sehingga indikator tersebut masih perlu dikembangkan.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya. Kawasan hutan konservasi dibedakan menjadi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru. Yang termasuk kawasan suaka alam ialah cagar alam dan suaka margasatwa, yang mana kawasan ini mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, serta berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Sedangkan kawasan pelestarian alam mencakup taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya.

Kawasan ini mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Total luas kawasan konservasi daratan di Indonesia sampai dengan tahun 2014 mencapai sekitar 22,42 juta hektar (Tabel 4.11.1). Kawasan konservasi daratan tersebut didominasi oleh taman nasional yang mencapai 55,00 persen, diikuti oleh suaka margasatwa (22,41 persen) dan cagar alam (17,66 persen).

2. Spesies Satwa dan Tumbuhan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan berusaha untuk menjaga kelestarian spesies satwa dan tumbuhan yang terancam punah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan penangkaran terhadap spesies satwa dan tumbuhan tersebut. Sampai dengan tahun 2014, tercatat ada sekitar 776 unit penangkaran satwa dan tumbuhan. Unit penangkaran terbanyak adalah penangkaran spesies mamalia yang mencapai 300 unit, diikuti penangkaran spesies aves sebanyak 218 unit.

Selain melakukan penangkaran spesies yang terancam punah, identifikasi jumlah populasi yang terancam punah juga penting dilakukan untuk memetakan seberapa banyak populasi yang ada. Hal ini untuk memastikan kelestarian spesies tersebut supaya jangan sampai benar benar punah.

O. PEMBANGUNAN EKONOMI.

Pada dasarnya tujuan pembangunan suatu negara adalah ingin mencapai masyarakat yang adil dan makmur dalam hal pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keperluan sekundernya. Meningkatnya taraf hidup masyarakat suatu negara menunjukkan adanya keberhasilan dalam pembangunan ekonomi di negara tersebut.

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tingginya angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sehingga, untuk mencapai tujuan pembangunan, terkadang pembangunan ekonomi lebih difokuskan pada upaya memacu pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang semata mata ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, sering kali tanpa memperhatikan keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan sehingga membawa dampak negatif bagi alam dan juga bagi masyarakat. Dampak negatif dari proses pembangunan ekonomi dapat dikurangi melalui pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, sehingga pembangunan yang kita rasakan sekarang ini juga bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Dalam tema pembangunan ekonomi, indikator-indikator yang dapat merefleksikan kemajuan di bidang pembangunan ekonomi antara lain produk domestik bruto, investasi, hutang luar negeri, tabungan bruto, inflasi, penduduk bekerja, pariwisata, akses terhadap internet dan telepon.

kegiatan produksi) seperti pembayaran deviden dan bunga. Indikator ini mengukur bagian dari pendapatan yang tersedia untuk investasi atau mungkin untuk transfer modal ke seluruh dunia.

Pada periode 2009-2014, tabungan bruto selalu mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 1.737,1 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp. 3.653,1 triliun pada tahun 2014. Apabila dilihat berdasarkan sektor, maka sektor yang paling banyak berkontribusi terhadap peningkatan tabungan bruto selama periode tersebut adalah sektor perusahaan swasta nonfinansial dan sektor rumah tangga.

3. Investasi

Investasi menggambarkan masukan modal yang diperlukan untuk mendorong proses pembangunan ekonomi. Investasi baik berupa investasi domestik maupun luar negeri dapat berdampak pada peningkatan kinerja pembangunan. Semakin besar investasi suatu negara akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Investasi juga memperluas kesempatan kerja, mendorong kemajuan teknologi dan spesialisasi dalam produksi sehingga meminimalkan ongkos produksi serta penggalian sumber daya alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan perekonomian. Di negara-negara berkembang, peningkatan peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi akan memperkuat daya tahan perekonomian dari berbagai gejolak dan meningkatkan kerjasama ekonomi global.

Peranan investasi dalam pembentukan PDB cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2006-2015 (Tabel 4.12.3). Pada tahun 2006, peran investasi dalam pembentukan PDB mencapai 25,40 persen, kemudian cenderung meningkat menjadi 34,56 persen pada tahun 2015. Kondisi seperti ini menunjukkan semakin membaiknya iklim investasi di

berarti terdapat sekitar 6,18 persen penduduk usia kerja yang menganggur. Persentase terendah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja terdapat di Provinsi Aceh dan Provinsi Maluku sebesar 90,07 persen, yang berarti sebesar 9,93 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut menganggur.

Selain data mengenai penduduk usia kerja, masalah ketenagakerjaan yang terkait dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah data tentang pekerja yang rentan kehilangan pekerjaannya. Pekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu anggota rumah tangga atau pekerja tidak dibayar dianggap sangat rentan, karena pada dasarnya tidak ada pengaturan kerja formal sehingga tingkat keamanan pekerjaan rendah dan kekurangan akses terhadap jaminan sosial. Indikator ini memberikan informasi mengenai informalisasi pasar tenaga kerja, yang mungkin berhubungan dengan meningkatnya kemiskinan.

Berdasarkan data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2009-2015, terlihat bahwa persentase pekerja yang rentan kehilangan pekerjaannya selalu menurun dari 58,33 persen pada tahun 2009 menjadi 46,84 persen pada tahun 2015 (Tabel 4.12.7). Persentase tertinggi pekerja yang rentan kehilangan pekerjaannya pada tahun 2015 tercatat di Provinsi Papua (80,05 persen), diikuti Provinsi Nusa Tenggara Timur (75,54 persen).

Selain indikator ketenagakerjaan diatas, indikator mengenai persentase pekerja wanita di sektor non pertanian juga penting bagi pembangunan karena indikator ini menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses ke pekerjaan yang dibayar. Hal ini menunjukkan sejauh mana pasar tenaga kerja terbuka untuk perempuan di sektor industri dan jasa yang mempengaruhi tidak hanya kesempatan kerja yang sama bagi perempuan, tetapi juga efisiensi ekonomi

meningkat. TIK sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan terkait erat dengan pembangunan sosial, ekonomi, dan kelembagaan. TIK juga merupakan faktor penting bagi banyak kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertukaran informasi antar warga. TIK yang makin modern dianggap relatif ramah lingkungan, karena merupakan pengganti potensial untuk transportasi dan relatif rendah terhadap pencemaran lingkungan. Indikator tentang TIK dapat dilihat dari persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap telepon, telepon seluler, komputer dan internet.

Persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap telepon, telepon seluler, komputer, dan internet selama periode 2014-2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, rumah tangga yang mempunyai akses terhadap komputer mempunyai persentase sebesar 18,71 persen atau meningkat 1,41 persen dibanding tahun 2014. Begitu pula rumah tangga dengan akses internet juga meningkat persentasenya sebanyak 6,34 persen menjadi 41,98 persen di tahun 2015. Persentase rumah tangga yang mempunyai akses telepon seluler sebesar 88,04 persen di tahun 2015 atau meningkat 1,09 persen dibanding tahun 2014.

Di satu sisi, persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap telepon mengalami penurunan sebesar 1,53 menjadi 4,01 persen di tahun 2015. Kontradiksi antara peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses telepon seluler dengan penurunan persentase rumah tangga yang mempunyai akses telepon menunjukkan bahwa saat ini masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan telepon seluler dibandingkan telepon biasa karena kemudahan dalam hal mobilitas.

Persentase tertinggi rumah tangga yang mempunyai akses terhadap telepon seluler, komputer, dan internet pada tahun 2015 terdapat di Provinsi DKI Jakarta, berturut-turut sebesar

perekonomian Indonesia karena sektor pariwisata relatif tahan terhadap krisis ekonomi.

P. KERJASAMA EKONOMI GLOBAL.

Di era globalisasi sekarang ini, masyarakat makin dimudahkan dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan banyak orang di banyak negara. Dalam konteks pembangunan ekonomi suatu negara, jaringan dan kerjasama yang baik antar negara pun perlu dilakukan sehingga kestabilan dan keadilan ekonomi makro dunia bisa terjaga. Hal ini merupakan syarat tercapainya tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan di dunia.

Bentuk kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi dapat berbentuk investasi langsung penanaman modal luar negeri, pinjaman luar negeri, pinjaman bantuan pembangunan resmi, dan perdagangan antar negara baik melalui ekspor maupun impor.

Nilai impor Indonesia selama periode 2010-2015 cenderung berfluktuatif. Nilai impor Indonesia pada tahun 2010 tercatat sebesar US\$ 135,66 miliar, terus mengalami kenaikan hingga menjadi US\$ 191,69 miliar pada tahun 2012. Nilai impor tersebut kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 yaitu berturut-turut menjadi US\$ 186,63 miliar, US\$ 178,18 miliar, dan US\$ 142,69 miliar. Selama tahun 2015, nilai impor Indonesia terbesar berasal dari kawasan Asia yang mencapai US\$ 105,02 miliar atau sebesar 73,60 persen dari keseluruhan nilai impor Indonesia. Jika dilihat berdasarkan negara, nilai impor Indonesia terbanyak berasal dari negara China yang mencapai 20,61 persen dari total nilai impor Indonesia, diikuti negara Singapura (12,63 persen) dan Jepang (9,30 persen).

Selain indikator impor, indikator terkait kerjasama ekonomi global yang lain adalah pinjaman luar negeri. Posisi pinjaman luar negeri Indonesia dari tahun 2011-2015 terus mengalami kenaikan setiap tahun. Posisi pinjaman luar negeri Indonesia pada tahun

Pengiriman uang dari tenaga kerja ke negara asal mereka (remitansi) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Remitansi merupakan sumber external funding terbesar ketiga setelah penanaman modal asing langsung dan pinjaman bantuan pembangunan resmi. Peranan remitansi yang sebenarnya adalah untuk menyokong ekonomi keluarga berupa pembiayaan pembangunan tempat tinggal dan usaha kecil serta membantu penyediaan infrastuktur sosial seperti sekolah dan rumah sakit. Remitansi memberikan arti penting bagi implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Persentase remitansi terhadap pendapatan nasional selama periode 2007-2011 terus mengalami penurunan dari 1,94 persen pada tahun 2007 menjadi 1,34 persen pada tahun 2011. Sementara pada periode 2012- 2015, persentase remitansi terhadap pendapatan nasional terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2,04 persen.

Q. KONSUMSI DAN POLA PRODUKSI

Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production,SCP) adalah pola atau mekanisme sistematis yang mengatur produksi dan konsumsi suatu produk sehingga benar-benar mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin keseimbangan ekosistem dan kesinambungan khususnya sumber daya alam. Pola konsumsi dan produksi berkelanjutan akan memberikan multi-manfaat yang penting, yaitu: perubahan pola konsumsi masyarakat efisien dan ramah lingkungan, pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta tumbuhnya kapasitas industri produk dan jasa yang ramah lingkungan.

Mengurangi intensitas material pada produksi dan konsumsi barang dan jasa sangat penting untuk perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Pengurangan intensitas material dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien dalam produksi dan konsumsi, mendaur ulang limbah dan

material yang sudah digunakan, dan pergeseran pola konsumsi barang dan jasa yang kurang intensif.

1. Konsumsi Energi

Energi merupakan komponen utama dalam penyediaan akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti makanan dan transportasi, serta sangat penting dalam kegiatan ekonomi khususnya kegiatan di bidang industri. Meskipun secara umum energi telah dianggap sebagai mesin kemajuan ekonomi, tetapi di sisi lain energi mempunyai dampak negatif dan tekanan yang besar terhadap lingkungan. Konsumsi bahan bakar fosil oleh sumber bergerak (transportasi) dan sumber tidak bergerak (rumah tangga dan industri) merupakan sumber utama pencemaran udara, sekaligus salah satu penyumbang terbentuknya emisi gas rumah kaca yang memicu terjadinya pemanasan global. Konsumsi energi setiap daerah akan berbeda-beda jumlahnya tergantung besarnya penduduk, aktivitas ekonomi penduduk, dan pola konsumsi penduduk.

Semakin besar jumlah penduduk maka konsumsi energinya juga akan semakin besar. Konsumsi energi yang tinggi akan menurunkan cadangan energi dan menurunkan kualitas udara melalui polusi yang ditimbulkan. Untuk menjamin energi yang berkelanjutan, 102 negara telah bergabung dalam Energi Berkelanjutan untuk Semua (*The Sustainable Energy for All, SE4ALL*) pada tahun 2014. SE4All ditujukan untuk mengkatalis transformasi sistem energi dunia menuju masa depan yang adil dan berkelanjutan. Mengubah sistem energi dunia akan menyebabkan peluang investasi multi-triliun dolar baru untuk menghilangkan kemiskinan energi, mengintegrasikan dan menyeimbangkan sumber energi konvensional dan terbarukan, mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan kemakmuran di negara-negara maju dan berkembang.

Efisiensi energi merupakan prioritas kebijakan yang berkembang di banyak negara di seluruh dunia. Hal ini secara luas diakui sebagai cara yang paling hemat biaya untuk mengatasi berbagai masalah yang berhubungan dengan energi, termasuk keamanan energi, dampak sosial dan ekonomi dari harga energi yang tinggi dan kekhawatiran tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Pada saat yang sama, efisiensi energi dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan kesejahteraan konsumen.

Pemakaian energi total termasuk biomasa terbesar di Indonesia selama periode 2002- 2009 digunakan oleh sektor rumah tangga, sedangkan pada tahun 2010-2014 didominasi oleh sektor industri (Gambar 4.14). Selama periode 2002-2014, pemakaian energi di sektor industri, transportasi, dan non energi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sektor rumah tangga, komersial dan sektor lainnya. Pada tahun 2014, pemakaian energi pada sektor industri mencapai 433,58 juta SBM (setara barel minyak), sementara pemakaian energi untuk rumah tangga sebesar 369,89 juta SBM, dan sektor transportasi sebesar 334,20 juta SBM (Tabel 4.14.1).

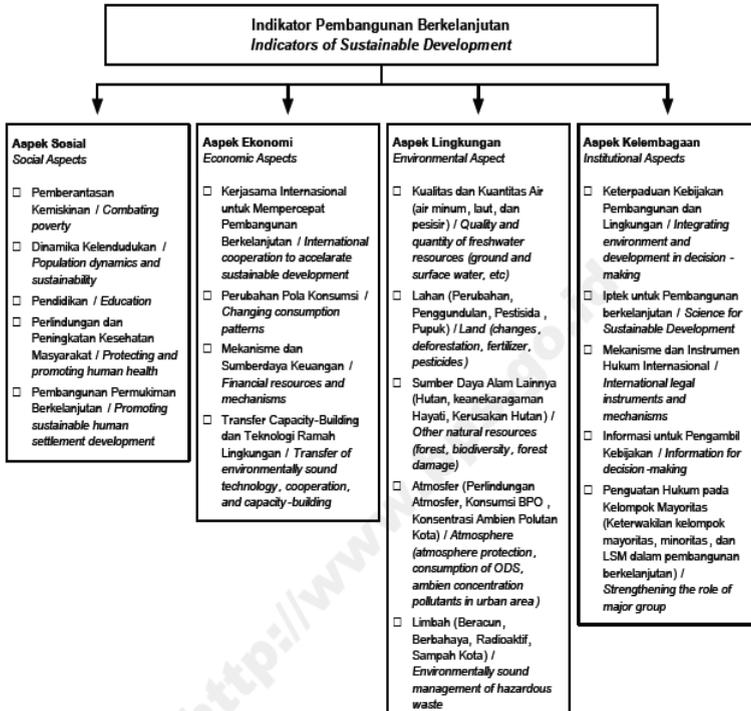
2. Transportasi

Sistem transportasi merupakan salah satu pilar dasar dari sebuah model pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Sistem transportasi mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan sosial dasar, seperti kesehatan, pendidikan, rekreasi, dsb. Sistem transportasi juga sangat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses ke pasar dan lapangan kerja. Disisi lain, sektor transportasi juga memberikan tekanan terhadap lingkungan melalui konsumsi bahan bakar dan polusi udara yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor. Di kota-kota besar atau wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, lalu lintas

penumpang, bus, truk, kereta dll) terhadap total transportasi barang di darat. Sarana transportasi kereta api baru tersedia di Pulau Jawa dan Sumatera.

Produksi angkutan kereta api penumpang yang dihitung dengan rata-rata jarak perjalanan per penumpang (km/orang) cenderung menurun selama periode 2011-2015. Sementara angkutan kereta api barang yang dihitung dengan rata-rata jarak angkut tiap ton barang (km/ton) cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015, rata-rata jarak perjalanan per penumpang di Pulau Jawa dan Sumatera tercatat sebesar 68 km/orang, turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 73 km/orang. Sementara rata-rata jarak angkutan barang tiap ton di Pulau Jawa dan Sumatera tercatat sebesar 314 km/ton, naik dari tahun sebelumnya (295 km/ton).

Gambar 2.1. Kerangka Kerja Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan, 1996
 Figure 2.1. Framework Used in the Construction of Sustainable Development Indicators, 1996



Sumber : Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB *Source United Nation - Commission on Sustainable Development (UN-CSD)*

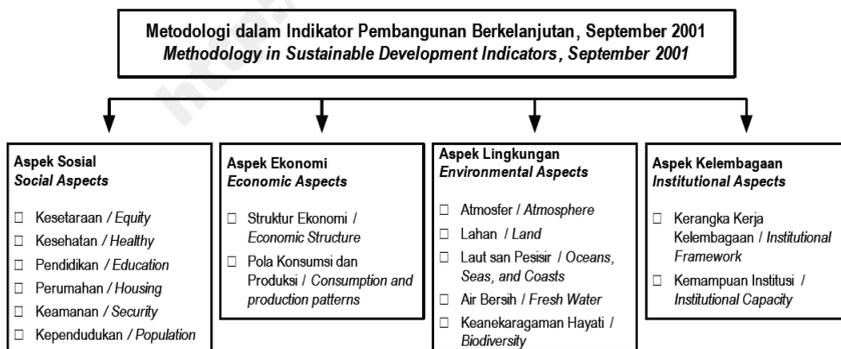
B. Kerangka Kerja DSR oleh CSD, 2001

Pada September 2001, CSD telah mempublikasikan laporan terbarunya mengenai indikator pembangunan berkelanjutan yang merupakan hasil evaluasi program kerja selama tahun 1996 – 2000. Hasil laporan tersebut merupakan presentasi akhir yang diharapkan menjadi kerangka kerja dan merupakan indikator-indikator inti (*the core set indicators*) yang disediakan bagi negara anggota dalam mewujudkan usahanya untuk mengukur kemajuan hasil-hasil pembangunan berkelanjutan yang telah dan akan dilaksanakan.

Sebagian besar negara anggota yang telah menerapkan indikator pembangunan berkelanjutan CSD menemukan bahwa sekumpulan indikator awal CSD tahun 1996 dianggap masih terlalu banyak sehingga kurang mudah untuk diterapkan.

Pada tahun 2001, indikator tersebut direvisi dan dikurangi hingga tersisa sebanyak 58 indikator. Indikator tersebut tertuang dalam kerangka kebijakan yang berorientasi tema dan sub tema, dan telah disesuaikan dengan implementasi dari Agenda 21. Sebenarnya indikator pokok hasil evaluasi CSD ini merupakan indikator pilihan dari indikator pembangunan berkelanjutan yang dipublikasikan pada tahun 1996, yang berjumlah sekitar 134 indikator.

Gambar 2.2. Kerangka Kerja Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan, 2001
Figure 2.2. Framework Used in the Construction of Sustainable Development Indicators, 2001



Sumber : Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB *Source United Nation - Commission on Sustainable Development (UN-CSD)*

mencakup isu yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan di sebagian besar negara. Kedua, indikator ini memberikan informasi penting yang tidak tersedia dari indikator inti lainnya dan ketiga, indikator ini dapat dihitung oleh sebagian besar negara dengan data yang tersedia ataupun dapat dihitung dengan waktu dan biaya yang memungkinkan. Sebaliknya, indikator yang bukan bagian dari indikator utama hanya relevan untuk sebagian kecil negara dan bisa digunakan sebagai informasi pelengkap untuk indikator utama atau tidak mudah tersedia untuk sebagian besar negara.

Sekumpulan indikator ini tetap mempertahankan kerangka tematik/sub-tematik yang diadopsi pada tahun 2001. Dengan demikian, tetap konsisten dengan praktek kebanyakan negara yang menerapkan sekumpulan indikator pembangunan berkelanjutan nasional. Indikator pembangunan berkelanjutan CSD yang di revisi terdiri dari 14 tema (kemiskinan, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, demografi, bencana alam, atmosfer, lahan, laut dan pesisir, air, keanekaragaman hayati, pembangunan ekonomi, kerjasama ekonomi global, serta konsumsi dan pola produksi), 44 sub-tema, 50 indikator utama, dan 46 indikator lain (Data tersaji dalam Lampiran 1).

BAB V

DESAIN BERKELANJUTAN ***(SUSTAINABLE DEVELOPMENT)***

A. KOTA BERKELANJUTAN *(SUSTAINABLE CITY)*

Menurut Brundtland (1987) *kota berkelanjutan (sustainable city) adalah kota yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang.* Dalam perkembangan konsep selanjutnya, kota berkelanjutan (*sustainable city*) dielaborasi oleh Stern, Whitney & While (1992) sebagai suatu interaksi antara sistem biologis dan sumberdaya, sistem ekonomi dan sistem sosial, meskipun dalam kelengkapan konsep berkelanjutan yang ada yaitu Ekologi-Ekonomi-Sosial tersebut akan semakin menyulitkan pelaksanaannya, namun jelas lebih bermakna dan gayut dengan masalah khususnya negara berkembang. Sebagai contoh, dengan masuknya tolok ukur sosial, sasaran keberlanjutan menjadi lebih jelas dan terarah, antara lain dikaitkan dengan upaya pemerataan sosial, penanggulangan dan penghapusan kemiskinan, keadilan spasial dan lain-lain. Dengan demikian, maka konsep kota berkelanjutan (*sustainable city*) berkembang lebih jauh, tidak lagi terpaku pada konsep awal yang lebih terfokus pada pemikiran kelestarian keseimbangan lingkungan semata-mata (Budihardjo & Sujarto, 1999).

Jika kita simpulkan secara ringkas mengenai batasan pengertiannya maka kota berkelanjutan (*sustainable city*) adalah : *“Kota yang dalam perkembangan dan pembangunannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan, vitalitas sosial,*

(Elkin, et.al., 1991; Newman, 1994). Lebih lanjut, melalui perencanaan efisiensi penggunaan lahan, yang dikombinasikan dengan skema daya listrik dan pemanasan, dan bangunan hemat energi juga akan dapat mereduksi emisi-emisi polutan yang beracun. (Nijkamp and Perrels, 1994; Owens, 1992). Kepadatan tinggi dapat membantu membuat persediaan amenities (fasilitas-fasilitas) dan yang secara ekonomis viable, serta mempertinggi keberlanjutan sosial (Haughton and Hunter, 1994).

Masalah utama yang terjadi pada penerapan ide kota kompak saat ini adalah anggapan bahwa ide ini bisa secara instan diterapkan tanpa melihat kasus per kasus permasalahan yang dihadapi oleh sebuah kota, di samping keharusan penyesuaian terhadap karakter kota. Beberapa kebijakan transportasi dan tata guna lahan yang erat dengan ide kota kompak menunjukkan pentingnya melihat kondisi perkembangan kota (pola pergerakan/transportasi, pola tata guna lahan), selain juga optimalisasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat. Munculnya kota-kota yang tersebar ke dalam wilayah pinggiran, berakibat kepada tersebarnya dan kurang meratanya penyediaan pelayanan-pelayanan dari sub-sub urban. Akibat lainnya adalah mahalnya biaya pembangunan infrastruktur, meningkatnya kemacetan karena bertambahnya volume lalu lintas, hilangnya banyak lahan pertanian, berkurangnya kenyamanan hidup baik di kota maupun wilayah pinggiran, dan terancamnya kondisi stabilitas pedesaan. Pada akhirnya, konsumsi energi bagi kota dan warganya juga akan semakin besar dan tak terelakkan.

Dengan kepadatan populasi penduduk yang besar, maka konsentrasi persoalan-persoalan lingkungan, konsumsi sumber-sumber alam termasuk minyak khususnya, akan menjadi masalah sebuah kota. Oleh karena itu merencana, mengelola dan mengatur bentuk dan ruang kota dengan kebijakan publik yang benar, akan menjadi satu faktor kunci keberhasilan penghematan. Pada akhirnya, jika kebijakan dan prakteknya dapat ditemukan dan

dijalankan dengan benar, sudah dipastikan akan mendapatkan efisiensi dan keuntungan yang besar.

Sulit untuk menenapkan konsep kota kompak (*compact city*) secara utuh ke dalam perencanaan kota di negara berkembang karena banyaknya permasalahan yang ada, antara lain :

1. Kurangnya infrastruktur sosial yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang melebihi pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatnya hunian liar (sgutter).
3. Spekulasi tanah.
4. Sulitnya urban redevelopment melalui demolisi permukiman kumuh.
5. Lemahnya sistem *transportasi public*.
6. Kurangnya kapasitas perencanaan kota.

B. PRINSIP *SUSTAINABILITY REPORT*

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ditujukan untuk mencapai transparansi, sebuah nilai dan tujuan yang menjadi dasar dari semua aspek dalam *sustainability report*. Transparansi dapat didefinisikan sebagai pengungkapan informasi secara lengkap atas topik dan indikator yang dibutuhkan dalam menggambarkan dampak serta memungkinkan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan, proses, prosedur, dan asumsi yang digunakan untuk menyiapkan pengungkapan (GRI, 2006).

Prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi dua kelompok:

a. Prinsip pelaporan untuk menetapkan isi

- Materialitas : informasi dalam sebuah laporan harus mencakup topik dan indikator yang menggambarkan dampak signifikan dari ekonomi, lingkungan, dan sosial terhadap organisasi atau yang dapat mempengaruhi penilaian dan kebijakan dari pemangku kepentingan secara substantif
- Pelibatan *stakeholder* : organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya dan menjelaskan dalam laporan cara organisasi merespons harapan dan kepentingan dari *stakeholder*
- Konteks *sustainability*: laporan harus memperlihatkan kinerja organisasi dalam konteks *sustainability* yang lebih luas
- Kelengkapan: cakupan topik, indikator, dan definisi batasan laporan harus menggambarkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dan memungkinkan *stakeholder* untuk menilai kinerja organisasi dalam periode laporan berjalan

b. Prinsip pelaporan untuk menetapkan kualitas

- Keseimbangan: laporan harus menggambarkan aspek positif dan negatif dari kinerja perusahaan untuk dapat memungkinkan penilaian yang masuk akal terhadap keseluruhan kinerja

- Dapat diperbandingkan: isu-isu dan informasi harus dipilih, dikumpulkan, dan dilaporkan secara konsisten
- Kecermatan: informasi yang dilaporkan harus cukup cermat dan detail bagi *stakeholder* untuk menilai kinerja organisasi
- Ketepatan waktu: penyusunan laporan dilakukan berdasarkan jadwal reguler dan informasi kepada *stakeholder* tersedia tepat waktu ketika dibutuhkan dalam mengambil kebijakan
- Kejelasan: informasi harus disediakan dalam cara yang dapat dimengerti dan diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan
- Keterandalan: informasi dan proses yang digunakan dalam penyusunan laporan harus dikumpulkan, direkam, dikompilasi, dianalisis, dan diungkapkan dalam sebuah cara yang dapat diuji dan dapat dibentuk kausalitas dan materialitas dari laporan.

C. MANFAAT *SUSTAINABILITY REPORT*

Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), manfaat yang didapat dari pengungkapan *sustainability report* antara lain :

1. Memberikan informasi kepada *stakeholder* (pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) sehingga meningkatkan prospek perusahaan dan membantu mewujudkan transparansi.
2. Membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan *brand value*, *market share*, dan *customer loyalty* jangka panjang.
3. Menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola risikonya.

4. Digunakan sebagai stimulasi *leadership thinking* dan *performance* yang didukung dengan semangat kom-petisi.
5. Mengembangkan dan memfasilitasi pengimplemen-tasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial.
6. Mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang.
7. Membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.

B. PARTISIPASI

SDGs dibangun secara partisipatif. PBB bekerja sama dengan beberapa lembaga mitranya telah menyelenggarakan survei warga, yang disebut sebagai *Myworld Survey* (<http://data.myworld2015.org/>).

Hasil survei hingga November tanggal 21 pukul 11.34 telah mengumpulkan sebanyak 8,5 juta lebih suara (persisnya 8.583.717 untuk semua negara). Untuk seluruh dunia, empat prioritas menjadi usulan yaitu pendidikan yang bermutu, kesehatan yang lebih baik, kesempatan kerja lebih baik, dan tata pemerintahan yang jujur dan tanggap. Untuk Indonesia, telah terkumpul 38 ribu suara (persisnya 38.422 suara), dengan prioritas yang sedikit berbeda dengan prioritas global yaitu; pendidikan yang bermutu, kesehatan yang baik, tata pemerintahan yang jujur dan tanggap, serta kesempatan kerja yang lebih baik. Survei mengajak warga untuk memilih enam di antara 16 keadaan yang lebih baik untuk masa depan. Meksiko menjadi negara yang paling banyak menyumbang suara, dengan jumlah lebih dari 1,6 juta suara. Survei ini diadakan sejak 2013 hingga 2015, untuk menjadi masukan bagi Sekjen PBB dan para pemimpin dunia yang merumuskan dan mengesahkan SDGs pada September 2015.

C. TUJUAN SDG'S

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. Menghilangkan kelaparan. mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik. serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua.
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, J., Bambang Kusmiarso, Bambang Pramono, Erwin G Hutapea, Andry
- Akerlof, G, William Dickens, and George Perry (1996). The macroeconomics of low inflation. Brookings Papers on Economic Activity.
- Alamsyah, Halim, Charles Joseph, Juda Agung, and Doddy Zulverdy (2001). Framework for Implementing Inflation Targeting in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, December.
- Anonim (1990), The Interparliamentary Conference on the Global Environment. April 29-May 2, 1990. Washington D.C.
- Arief, Sritua and Adi Sasono (1980) Indonesia: Dependency and Underdevelopment. Meta, Kuala Lumpur.
- Badan Pusat Statistik dan Macro International. 2008. Indonesia Demographic and Health Survey 2007. Calverton, Maryland, USA: BPS and Macro International.
- Badan Pusat Statistik dan ORC Macro. 2003. Indonesia Demographic and Health Survey 2002-2003. Calverton, Maryland, USA: BPS and ORC Macro.
- Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kemenkes, and ICF Internasional. 2013. Indonesia Demographic and Health Survey 2012. Jakarta, Indonesia: BPS, BKKBN, Kemenkes, and ICF Internasional.
- Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kemenkes, dan Macro International Inc. 1998. Indonesia Demographic and Health Survey 1997.

- BNPB. 2014. Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013. Jakarta: BNPB.
- BPJS Ketenagakerjaan. 2013. Laporan Berkelanjutan 2016. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan. 2014. Laporan Tahunan 2014. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- BPJS Ketenagakerjaan. 2016. Resume Laporan Pengelolaan Program (Audited) 2015. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- BNPB. 2011. Indeks Rawan Bencana Indonesia Tahun 2011. Jakarta: BNPB.
- Budiati, Indah, dkk. 2015. Kajian Indikator Lintas Sektor: Potret Awal Pembangunan Pasca MDGs, Sustainable Development Goals (SDGs). Jakarta: BPS.
- Calverton, Maryland: CBS and MI.
- Conway, G.R. and E.B. Barbier (1990) After the Green Revolution: Sustainable Agriculture for Development. London, Earthscan Publication Ltd.
- Danusaputro, Munadjat, 1985, Hukum Lingkungan Buku I : Umum, Binacipta, Bandung.
- Davidson., 1989, Environmental Considerations in Loan Documentation, dimuat dalam The Banking Law Journal Vol. 108 No. 4 Juli-Agustus.
- Department of Information Republic of Indonesia (1991) Indonesia 1991: An Official Handbook. Department of Information, Directorate of Foreign Information Services.
- Djajadinigrat, 2001 Untuk Generasi Masa Depan: “Pemikiran, Tantangan dan Permasalahan Lingkungan”, ITB.
- Djajadinigrat, S.T. (1992) Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Membangun Tanpa Merusak Lingkungan. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Elang Lilik, 2003 Kumpulan Makalah Perubahan Lingkungan Global dan kerjasama Internasional, IPB

- Fauzi.A. 2004, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Heal, G.1998 Valuing the Future : Economic Theory and Sustainability. Columbia University Press.New York.
- http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/info/renbut.php
diakses pada November 2016
- <http://data.worldbank.org/> diakses pada Desember 2016
- <http://dibi.bnbp.go.id/data-bencana/statistik> di akses pada bulan desember 2016 <http://komisiinformasi.go.id/> diakses pada November 2016
- <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2015/month/12> diakses pada Oktober 2016
- <http://unstats.un.org/> di akses pada bulan desember 2016
- <http://www.anggaran.depkeu.go.id/> diakses pada Desember 2016
- <http://www.bps.go.id/> diakses pada Desember 2016
- <http://www.komnasperempuan.go.id/> diakses pada November 2016
- <http://www.ombudsman.go.id/> diakses pada November 2016
- <http://www.ti.or.id/> diakses pada Oktober 2016 Iconesia. 2015.
- IUCN, UNEP dan WWF (1993) Bumi, Wahana Strategi Menuju Kehidupan yang Berkelanjutan. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2016. Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2015. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014. Jakarta: Kemenkes RI.

- Kementerian Perhubungan. 2016. Buku Informasi Transportasi 2015. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan. 2016. Statistik Perhubungan 2015 Buku I. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan. 2016. Statistik Perhubungan 2015 Buku II. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Kementrian Kesehatan RI. 2013. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Laporan Survei Kepuasan Badan Pusat Statistik (BPS). Jakarta.
- Nuraini, dkk. 2016. Profil Penduduk Indonesia Hasil Supas 2015. Jakarta: BPS.
- Nuraini. 2011. Fertilitas Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010. Jakarta: BPS.
- Pasmuko, Nugroho J Prastowo (2001). Credit Crunch in Indonesia in the Aftermath of the Crisis: Facts, Causes and Policy Implications. Bank Indonesia, Directorate of Economic Research and Monetary Policy.
- Pearce, D.W. and J.J. Wardford (1993) World Without End, Economics, Environment and Sustainable Development. Oxford University Press.
- Penny K. Lukito. MCP. Ph.D. 2013. Kebijakan Subsidi Untuk Pelayanan Air Minum Yang Berkeadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Perkotaan. Jurnal Perencanaan Pembangunan Vol. XIX no.1. Jakarta: Bappenas.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: Pm 69 Tahun 2013 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
- PSDP Kemendikbud. 2011. Statistik Sekolah Dasar 2011/2012. Jakarta: Setjen Kemendikbud.

- PSDP Kemendikbud. 2011. Statistik Sekolah Menengah Atas 2011/2012. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2011. Statistik Sekolah Menengah Kejuruan 2011/2012. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2011. Statistik Sekolah Menengah Pertama 2011/2012. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2012. Statistik Pendidikan Anak Usia Dini 2012/2013. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2012. Statistik Sekolah Dasar 2012/2013. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2012. Statistik Sekolah Menengah Atas 2012/2013. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2012. Statistik Sekolah Menengah Kejuruan 2012/2013. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2012. Statistik Sekolah Menengah Pertama 2012/2013. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2014. Statistik Pendidikan Anak Usia Dini 2013/2014. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2014. Statistik Sekolah Dasar 2013/2014. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2014. Statistik Sekolah Menengah Atas 2013/2014. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2014. Statistik Sekolah Menengah Kejuruan 2013/2014. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2014. Statistik Sekolah Menengah Pertama 2013/2014. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2015. Statistik Pendidikan Anak Usia Dini 2014/2015. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2015. Statistik Sekolah Dasar 2014/2015. Jakarta: Setjen Kemendikbud.

- PSDP Kemendikbud. 2015. Statistik Sekolah Luar Biasa 2014/2015. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2015. Statistik Sekolah Menengah Atas 2014/2015. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2015. Statistik Sekolah Menengah Kejuruan 2014/2015. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2015. Statistik Sekolah Menengah Pertama 2014/2015. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2016. Statistik Sekolah Dasar 2015/2016. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2016. Statistik Sekolah Luar Biasa 2015/2016. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2016. Statistik Sekolah Menengah Atas 2015/2016. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2016. Statistik Sekolah Menengah Kejuruan 2015/2016. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- PSDP Kemendikbud. 2016. Statistik Sekolah Menengah Pertama 2015/2016. Jakarta: Setjen Kemendikbud.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2014. Hipertensi. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2014. Malaria. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2014. Situasi dan Analisis HIV AIDS. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Ramadani Ganis & Suwito, Hardjo., 1988, Peranan Monitoring Lingkungan untuk Menjaga Kualitas Lingkungan (Makalah), Samarinda.
- Redecon, ADB, 1990 Indonesia Economic Policies For Sustainable Development, ADB Publication.

- Rostow, W.W. (1971) *The Stage of Economic Growth*. Cambridge University Press.
- Salim, Emil., 1976, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Kesepuluh, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Sekretariat PROPER KLHK. 2015. PROPER 2015. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan. 2014. *Statistik Kriminal 2014*. Jakarta: BPS.
- Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan. 2016. *Statistik Kriminal 2016*. Jakarta: BPS.
- Subdirektorat Statistik Rumah Tangga. 2013. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2012*. Jakarta: BPS.
- Subdirektorat Statistik Rumah Tangga. 2014. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2013*. Jakarta: BPS.
- Subdirektorat Statistik Rumah Tangga. 2015. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2014*. Jakarta: BPS.
- Subdirektorat Statistik Rumah Tangga. 2015. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015*. Jakarta: BPS.
- Sutamihardja, 2004 *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana*; IPB.
- Sutoyo, Agus., 1997, *Pembinaan dan Pendidikan Kepedulian Lingkungan (artikel)*, *Harian Angkatan Bersenjata*.
- Syafrudin, dkk. 2009. *Kebidanan Komunitas*. Jakarta: EGC. United Nations. 2016.
- The Sustainable Development Goals Report 2016*. New York: United Nations.
- Todaro, M.P. (1989) *Economic Development in the Third World*, Fourth Edition. Longman Group Limited.

World Bank Group. 2016. Migration and Remittances Factbook
2016 Third Edition. Washinton, DC:Wolrd Bank.

World Bank. 2015. Adjusting to a changing world. Washington:
World Bank.

SATUAN / UNIT

Barel / barrel : 158,99 liter/litres = 1/6,2898
m³

Kilometer (km) / kilometers (km) : 1 000 meter/meters (m)

Kwintal (kw) / quintal (ql) : 100 kg

MSCF : 1/35,3 m³

Metric ton (m. ton)/metric ton (m.ton) : 0,98421 long ton= 1000 kg
ton / ton : 1 000 kg

SINGKATAN :

ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku
AHH	: Angka Harapan Hidup
AIDS	: Acquired Immuno Deficiency Syndrome
AKB	: Angka Kematian Bayi / <i>Infant Mortality Rate</i> (IMR)
AMH	: Angka Melek Huruf / <i>Literacy Rate</i>
API	: Annual Parasite Incidence
APM	: Angka Partisipasi Murni Net Enrollment Ratio (NER)
BCG	: Bacillus Calmette Guerin
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Meteorology, <i>Climatology Ana Geofisika Geophysics Agency</i>
BOD	: Biochemical Oxygen Demand
BPO	: Bahan Perusak Ozon <i>Ozone Depleting Substance</i> (ODS)
CIF	: <i>Cost Insurance and Freight</i>
COD	: <i>Chemical Oxygen Demand</i>
CSD	: <i>Commission on Sustainable Development</i>
DPT	: <i>Difteri Pertusis Tetanus</i>
DSD	: <i>Division for Sustainable Development</i>
DSR	: <i>Driving Force-State-Response</i>
GK	: Garis Kemiskinan Poverty Line
GNI	: <i>Gross National Income</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca <i>Green House Gases</i>

(GHG) HIV	: Human Immunodeficiency Virus
IPCC	: Intergovernmental Panel on Climate Change
KB	: Keluarga Berencana Family Planning
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi High Level Conference
MDGs	: Millenium Development Goals
NSB	: Negara Sedang Berkembang Less Development Countries
ODA	: Official Development Asistance
PDB	: Produk Domestik Bruto Gross Domestic Product (GDP)
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product (GRDP)
PNB	: Produk Nasional Bruto Gross National Product (GNP)
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat Public Health Center
Pustu	: Puskesmas Pembantu Subsidiary Public Health Center
Sakernas	: Survei Angkatan Kerja Nasional National Labor Force Survey
SBM	: Setara Barel Minyak Barrel Oil Equivalent (BOE)
SP	: Sensus Penduduk Population Census
SUPAS	: Survei Penduduk Antar Sensus Inter Censal Population Survey
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional National Socio Economic Survey
OECD	: Organization for Economic Cooperation and Development

TB	: Tuberculosis
TFR	: Total Fertility Rate
WCED	: World Commission on Environmental and Development
WHO	: World Health Organization
WTO	: World Trade Organization

BIOGRAFI PENULIS



SUDIRMAN merupakan anak keempat dari empat bersaudara, lahir di Teluk Pandak Kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi tanggal 13 Agustus 1974 yang merupakan putra dari (alm) Bapak Muhammad Idris Arsyad, yang beralamatkan di Jl. TP. Sriwijaya RT.10 Kelurahan Beliung Kec. Alam Barajo Kota Jambi. Pendidikan S1 dengan jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Negeri Jambi, S2 di Institut Agama Islam Negeri Jambi (IAIN STS) jurusan Ekonomi Islam, pendidikan S3 di Universitas Trisakti Jakarta dengan jurusan Islamic Economic and Finance (IEF).

Saat ini penulis sebagai Dosen tetap di Universitas Batanghari (UNBARI) di Fakultas Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan. Ada beberapa Mata Kuliah yang di ampuh diantaranya: 1. Ekonomi Islam, 2. Ekonomi Makro, 3. Ekonomi Mikro, 4. Ekonomi Pembangunan dan Metodologi Penelitian

Penulis juga aktif dalam penelitian yang diterbitkan dalam sebuah jurnal ilmiah salah satu penelitian yang di terbitkan di jurnal International adalah “*Effect of Government Expenditure, Invesment, Work Force on Economic Growth in The Provinse Jambi*” *IOSR Journal Economic an Finance.*, India 2016. Mengajar di beberapa perguruan tinggi diantaranya di Universitas Batanghari, IAIN STS Jambi, Universitas Trisakti dan STIE Muhammadiyah Jambi.